



PERUBAHAN RENSTRA

TAHUN 2021-2026



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Akhir kata, atas diselesaikannya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Pangandaran, 30 September 2022

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN



TONTON GUNTARI, S.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661206 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	36
3.1. Identifikasi Permasalahan	37
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3. Telaah Renstra K/L Dan Renstra.....	46
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	50
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	68
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	108
BAB VIII PENUTUP	111

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	18
TABEL 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	21
TABEL 2.3	Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	22
TABEL 2.4	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	27
TABEL 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	32
TABEL 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	50
TABEL 3.2	Matriks Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)	53
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	61
TABEL 4.2	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	62
TABEL 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	65
TABEL 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	70
TABEL 6.2	Formulasi Perhitungan Indikator Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	90
TABEL 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	109
TABEL 7.2	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	110

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Dan Renstra K/L	3
GAMBAR 1.2	Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..	3
GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KabupatenPangandaran	9
GAMBAR 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	17
GAMBAR 2.3	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan	17
GAMBAR 2.4	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
GAMBAR 2.5	Persentase ASN Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
GAMBAR 2.6	LHE Implementasi SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018-2021	22
GAMBAR 2.7	Objek Pemajuan Kebudayaan	23
GAMBAR 2.8	Realisasi Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal Tahun 2018-2021	24
GAMBAR 2.9	Tarian Pada saat Penyambutan Acara	25
GAMBAR 2.10	Subsektor Ekonomi Kreatif dan Pembinaan Pelaku Kreatif Tahun 2021	26
GAMBAR 2.11	Realisasi Jumlah PAD Sektor Pariwisata.....	28
GAMBAR 2.12	Kriteria GSTC-D.....	30
GAMBAR 4.1	Arsitektur Kinerja Pembanguna Daerah	59
GAMBAR 4.2	Hubungan Kinerja Pembanguna Daerah	59

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Landasan Hukum**
- 1.3 Maksud dan Tujuan**
- 1.4 Sistematika Penulisan**



1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan Rencana Strategis OPD untuk periode lima tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik maka disusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (Perjanjian Kinerja).

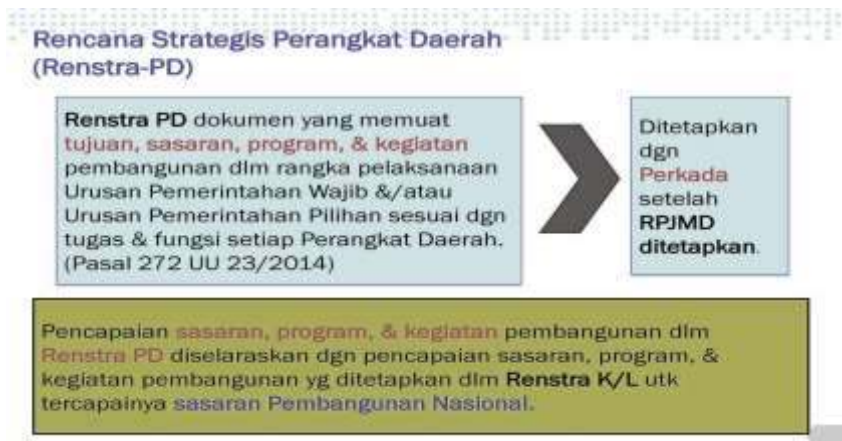
Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD;
3. Penyesuaian dan penyempurnaan indikator dan target kinerja;

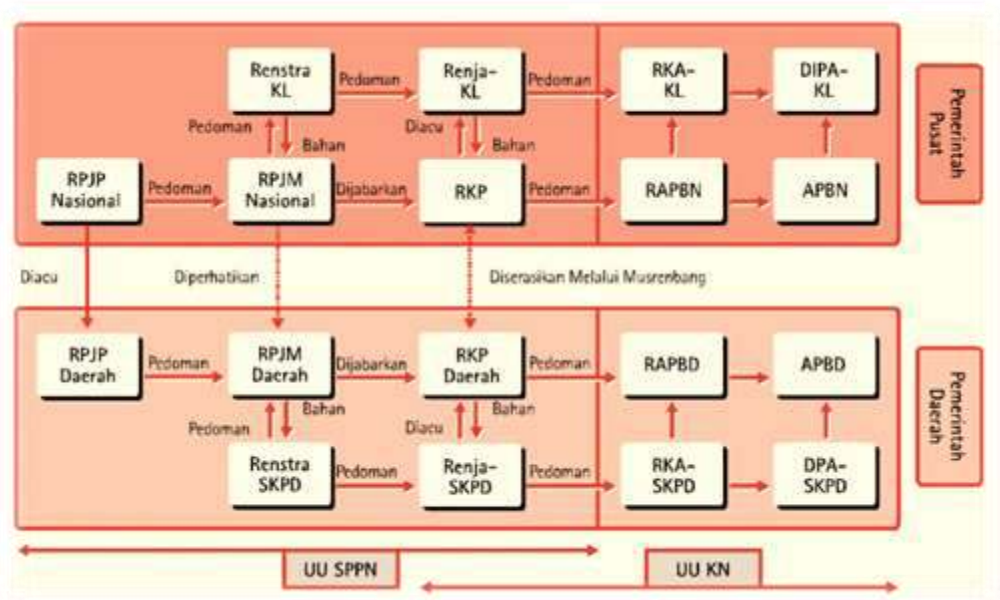
4. Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2021-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program,kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Dan Renstra K/L



Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada:

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
3. Landasan Operasional

- a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- e. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- i. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional 2010 – 2025;
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018 – 2025;
- o. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah;
- p. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Bagian Selatan;
- q. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- r. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rancana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- u. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
- v. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian;
- y. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum;
- z. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- bb. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- cc. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- dd. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- ee. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025;
- gg. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039;
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- ll. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025;

- mm. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- nn. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran;
- oo. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran;
- pp. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- qq. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2021 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman/dokumen perencanaan untuk periode lima tahun dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kabupaten Pangandaran bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Program/kegiatan/Sub Kegiatan dalam Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari RPJMD Kabupaten Pangandaran dan RPJPD Kabupaten Pangandaran yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

2. Tujuan

- a. Menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Pangandaran ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan periode tahun 2021-2026 beserta program prioritas dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- b. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran serta rencana penganggarnya untuk periode Tahun Anggaran 2021-2026;
- c. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan

Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran**
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran**
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran**
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran**



2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

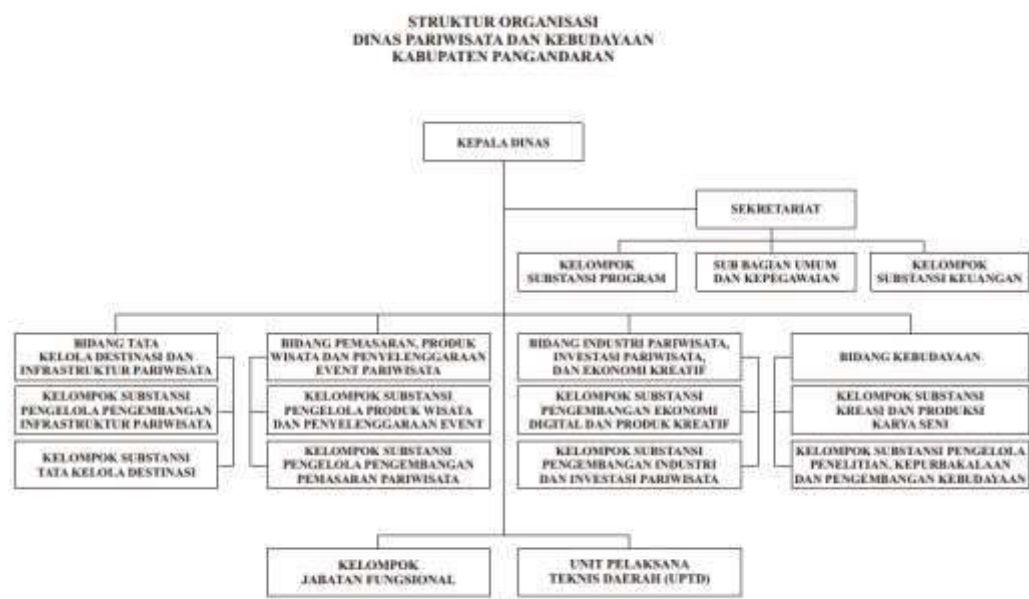
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2021 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan umum dan kebijakan teknis, mengoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi meliputi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pelaksana kebijakan daerah di bidang pariwisata, dan kebudayaan;
 - c. pelaksana evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pariwisata, dan kebudayaan;
 - d. pelaksana tata kelola administrasi dinas; dan
 - e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, dan Kebudayaan;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata, dan Kebudayaan;
 - c. memantau, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang Pariwisata, dan Kebudayaan;
 - d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, dan Kebudayaan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, dan Kebudayaan;
 - f. melaksanakan tata kelola administrasi Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Dinas membawahkan :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata;
 - c. Bidang Pemasaran, Produk Wisata dan Penyelenggaraan Event Pariwisata;
 - d. Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Bidang Kebudayaan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a) mengelola dan membina administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
 - b) menyusun dan mengoordinasikan program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, kegiatan bidang, dan perlengkapan;
 - c) menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - d) menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan serta rumah tangga di lingkungan Dinas;
 - e) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan bidang ketatausahaan lainnya; dan
 - f) mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a) menyusun rencana program kerja sekretariat;
 - b) mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
 - c) mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi perencanaan, keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
 - d) mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan Dinas;
 - e) mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, anggaran serta pelaporan kegiatan Dinas;
 - f) mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - g) melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - i) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Substansi Keuangan;
 - c) Kelompok Substansi Program.

b. Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

- (1) Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata;
 - b) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c) menyelenggarakan dan merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata;
 - d) pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah dalam hal Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata;
 - e) pembinaan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah dalam hal Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata; dan
 - f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a) merumuskan perencanaan dan program kerja bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program dinas;
 - b) merumuskan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
 - c) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Infrastruktur Pariwisata; dan Kelompok Substansi Tata Kelola Destinasi sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - d) mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Infrastruktur Pariwisata; dan Kelompok Substansi Tata Kelola Destinasi sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - e) mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Infrastruktur Pariwisata; dan Kelompok Substansi Tata Kelola Destinasi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - f) melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata; dan
 - g) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan
- (4) Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata sebagaimana dimaksud, membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Infrastruktur Pariwisata; dan
 - b) Kelompok Substansi Tata Kelola Destinasi.

c. Bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata

- (1) Bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di Bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemasaran, Produk Wisata dan Penyelenggaraan Event Pariwisata;
 - b) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c) menyelenggarakan dan merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata;
 - d) Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata;
 - e) Pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata; dan
 - f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a) merumuskan perencanaan dan program kerja bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program dinas;
 - b) merumuskan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata;
 - c) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengelola Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event; dan Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - d) mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Kelompok Substansi Pengelola Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event; dan Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - e) mengevaluasi pelaksanaan Kelompok Substansi Pengelola Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event; dan Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - f) melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata; dan
 - g) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

- (4) Kepala Bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata sebagaimana dimaksud, membawahkan:
 - a) Kelompok Substansi Pengelola Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event;
 - b) Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

d. Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- (1) Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
 - b) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c) menyelenggarakan dan merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; dan
 - d) Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
 - e) Pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; dan
 - f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) merumuskan perencanaan dan program kerja bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program dinas;
 - b) merumuskan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
 - c) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dan Kelompok Substansi Pengembangan Industri Dan Investasi Pariwisata sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - d) mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dan Kelompok Substansi Pengembangan Industri Dan Investasi Pariwisata sesuai pedoman yang ditetapkan;

- e) mengevaluasi pelaksanaan Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Digital Dan Produk Kreatif dan Kelompok Substansi Pengembangan Industri Dan Investasi Pariwisata sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - f) melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif; dan
 - g) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan
- (4) Kepala Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
- a) Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Digital Dan Produk Kreatif dan
 - b) Kelompok Substansi Pengembangan Industri dan Investasi Pariwisata.
- e. Bidang Kebudayaan**
- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi meliputi:
- a) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
 - b) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang kebudayaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c) menyelenggarakan dan merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang kebudayaan; dan
 - d) Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal pemajuan kebudayaan;
 - e) Pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal pemajuan kebudayaan; dan
 - f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kebudayaan.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud, meliputi:
- a) merumuskan perencanaan dan program kerja bidang terkait upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program dinas;
 - b) merumuskan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
 - c) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Kelompok Substansi Kreasi dan Produksi Karya Seni dan Kelompok Substansi Pengelola Penelitian, Kepurbakalaan dan Pengembangan Kebudayaan sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - d) mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Kelompok Substansi Kreasi dan Produksi Karya Seni dan Kelompok Substansi Pengelola Penelitian,

Kepurbakalaan dan Pengembangan Kebudayaan sesuai pedoman yang ditetapkan;

- e) mengevaluasi pelaksanaan Kelompok Kelompok Substansi Kreasi dan Produksi Karya Seni dan Kelompok Substansi Pengelola Penelitian, Kepurbakalaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - f) melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Kebudayaan; dan
 - g) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan
- (4) Kepala Bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a) Kelompok Kelompok Substansi Kreasi dan Produksi Karya Seni;
 - b) Dan Kelompok Substansi Pengelola Penelitian, Kepurbakalaan Dan Pengembangan Kebudayaan.

f. Unit Pelayanan Teknis Daerah

- 1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- 2) Pembentukan, Tugas Pokok, fungsi, Rincian Tugas Unit serta Susunan Organisasi dan Tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud , ditetapkan oleh Bupati.

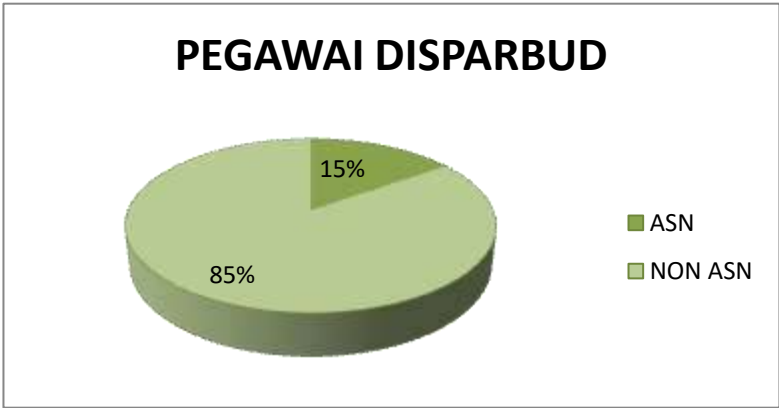
g. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Kelompok dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 4) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- 5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud, diatur sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

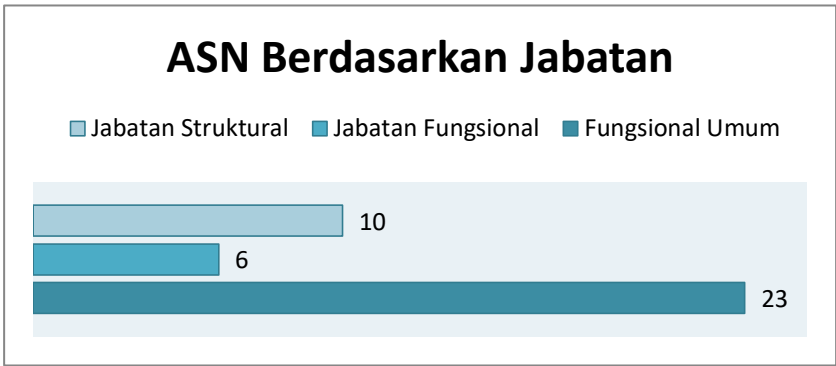
A. Sumber Daya Manusia

Jumlah personil Sumber Daya Manusia yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sampai Bulan September Tahun 2022 adalah sebanyak 39 pegawai ASN dan 218 Non ASN, sebanyak 31 pegawai ASN ditempatkan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, di UPT Wilayah Cijulang sebanyak 3 orang dan UPT Wilayah Pangandaran sebanyak 5 orang.



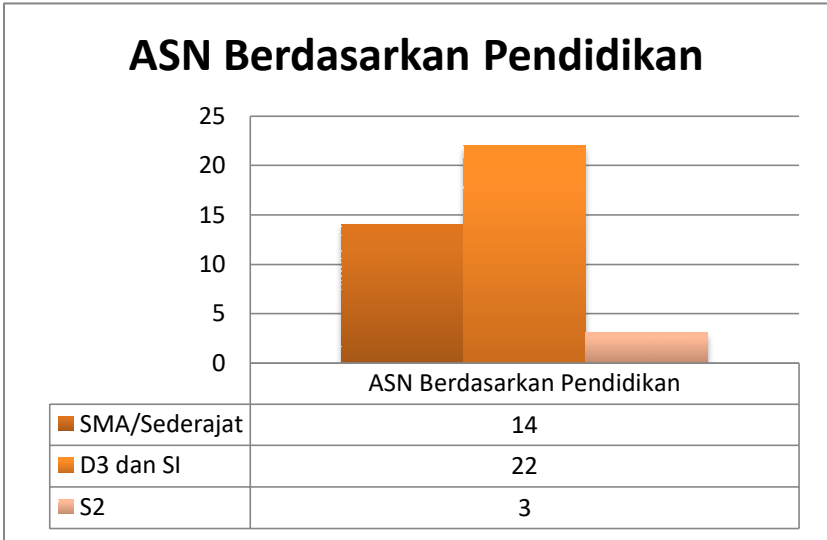
Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Berikut data ASN berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jabatan



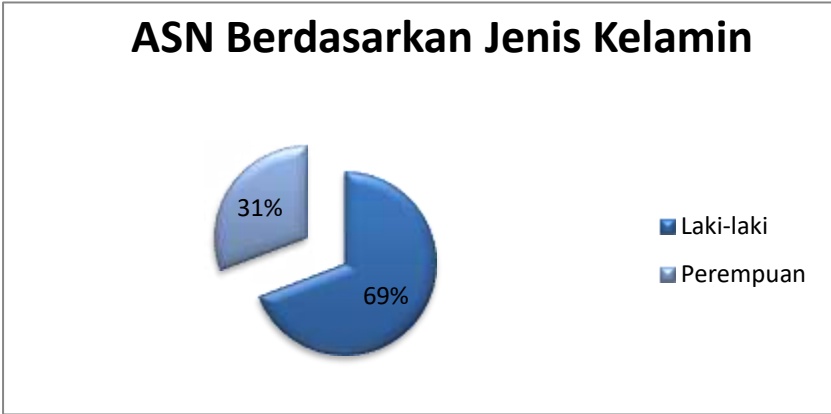
Gambar 2.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jabatan ada 10 ASN yang mengisi jabatan struktural, 6 jabatan fungsional dan 23 orang pegawai fungsional umum yang distempatkan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kan Kantor UPTD.



Gambar 2.4 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan ada 3 orang ASN yang berpendidikan S2, 21 orang pegawai SI dan 1 orang pegawai D3 dan 14 orang berpendidikan SMA/Sederajat.



Gambar 2.5 Persentase ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin ASN di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 31% Perempuan dan 69 laki-laki.

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam mencapai target yang telah ditentukan.

B. Sarana dan Prasarana (Aset Dinas)

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari didukung oleh sarana dan prasarana. Berikut gambaran sarana dan prasarana (aset) yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sampai dengan Bulan September tahun 2022 dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana (Aset)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

NO	URAIAN	UNIT	KETERANGAN
1	2	3	4
	ASET TETAP		
	Tanah	12	
01	Tanah	12	
	Peralatan Dan Mesin	754	
01	Alat Besar	1	
02	Alat Angkutan	24	
03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2	
04	Alat Pertanian	6	
05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	389	
06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	105	

07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	17	
08	Alat Laboratorium	118	
09	Alat Persenjataan	9	
10	Komputer	80	
11	Alat Eksplorasi	-	
12	Alat Pengeboran	-	
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	
14	Alat Bantu Eksplorasi	-	
15	Alat Keselamatan Kerja	-	
16	Alat Peraga	-	
17	Peralatan Proses/Produksi	-	
18	Rambu - Rambu	3	
19	Peralatan Olah Raga	-	
	Gedung Dan Bangunan	167	
01	Bangunan Gedung	145	
02	Monumen	16	
03	Bangunan Menara	1	
04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	5	
	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	33	
01	Jalan Dan Jembatan	20	
02	Bangunan Air	12	
03	Instalasi	-	
04	Jaringan	1	
	Aset Tetap Lainnya	55	
01	Bahan Perpustakaan	18	
02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	37	
03	Hewan	-	
04	Biota Perairan	-	
05	Tanaman	-	
06	Barang Koleksi Non Budaya	-	
07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11	
01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11	
	ASET LAINNYA	171	
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	
01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	
	Aset Tidak Berwujud	11	
01	Aset Tidak Berwujud	11	
	Aset Lain-Lain	160	
01	Aset Lain-Lain	160	

Sumber: Bagian Aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 2022

Sumber daya sarana dan prasarana pendukung kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sampai dengan Tahun 2022 pada umumnya mempunyai kondisi baik dan dapat mendukung kinerja dinas.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara langsung dapat dilihat secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Disparbud Kabupaten Pangandaran, kinerja pelayanan yang dicapai selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN				REALISASI CAPAIAN TAHUN				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				CC	B	BB	BB	BB	BB	A	A	137,29%	138,89%	122,20%	107.76%
2	Persentase Pemajuan Kebudayaan lokal				25%	35%	70%	80%	20%	50%	60%	60%	80,00%	142,86%	85,71%	75,00%
3	Persentase pengembangan ekonomi kreatif				20%	30%	50%	70%	27,08%	39,58%	45,83%	52,08%	135,40%	131,93%	91,66%	74,40%
4	Jumlah PAD sektor Pariwisata				25 M	25 M	27,5 M	30 M	19.836.147.250	18.472.858.000	13.786.568.250	16.702.067.000	79,34%	73,89%	50,13%	55.67%
5	Persentase pemenuhan kriteria GSTC-D sektor pariwisata				40%	60%	80%	100%	58,53%	63,41%	63,41%	63,41%	146,33%	105,68%	79,26%	63,41%

Pangandaran, 30 September 2022

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN


TONTON GUNTARI, S.H
 Pembina Utama Muda , IV/c
 NIP. 19661206 199203 1 005

Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Renstra Perubahan selama empat tahun terakhir belum begitu optimal, pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran beserta target dan capaian realisasinya dikategorisasi sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagaimana berikut:

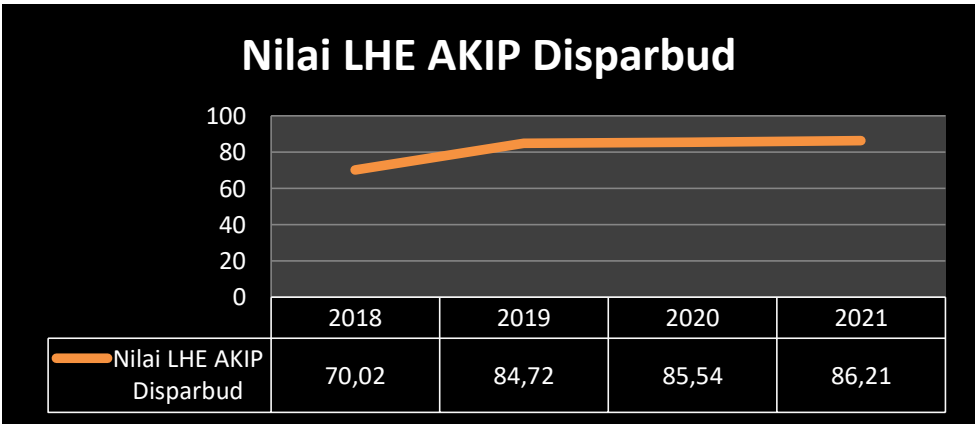
Table 2.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Baik
2	76% ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.3.1 Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama empat tahun terkahir berdasarkan laporan hasil evaluasi (LHE) atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.6 LHE Implemantasi SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018-2021

Realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hal tersebut didukung oleh pelaksanaan tindaklanjut hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disetiap tahunnya seperti dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah seperti dokumen pendukungnya disusun sesuai dengan peraturan yang ada dan kegiatan pendukung capaian dilaksanakan secara optimal sehingga rasio capaian bisa melebihi nilai 100% setiap tahunnya.

2.3.2 Persentase Pemajuan Kebudayaan lokal

Perhitungan persentase pemajuan kebudayaan lokal dihitung dari jumlah objek pemajuan kebudayaan lokal yang dikembangkan dibagi dengan jumlah objek pemajuan kebudayaan lokal. Untuk memajukan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, diperlukan langkah strategis berupa Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan objek pemajuan kebudayaan guna mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi:

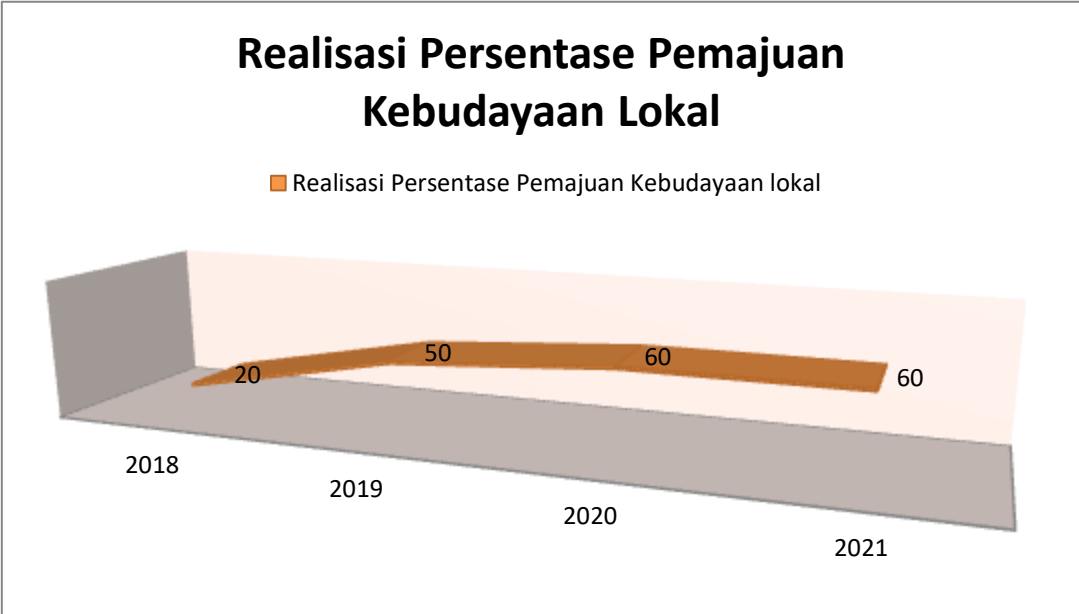


Gambar 2.7 Objek Pemajuan Kebudayaan

Dari sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut di atas, sampai pada tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan pengembangan dan penanganan sebanyak 6 (enam) objek pemajuan kebudayaan. Berikut 6 (enam) objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan di Kabupaten Pangandaran:

1. Ritus seperti pada proses karasemen adat pada kegiatan Hajat Laut yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Muhharam;
2. Seni seperti tarian Ronggeng yang dipentaskan pada acara Karnaval Seni Budaya dan Kegiatan di Ruang Publik;
3. Tradisi Lisan seperti eok beluk (yang dikolaborasi dengan musik);
4. Pengetahuan Tradisional seperti pembuatan Video Kuliner Khas Pangandaran yang dilakukan oleh bidang kebudayaan untuk proses pendaftaran WBTB dan permintaan video kuliner khas pangandaran untuk penampilan di kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah Tingkat Provinsi;
5. Permainan Tradisional seperti Permainan Layang-layang ketika pelaksanaan event *Kite Festival* dan pengenalan permainan tradisional kepada Finalis Mojang Jajaka (MOKA) Kabupaten Pangandaran untuk dapat disosialisasikan kepada anak-anak sekolah ketika

- mereka melakukan kegiatan MOKA *Goes to School* yang dilaksanakan sebelum pandemi covid-19 terjadi di Indonesia.
- Manuskrip seperti di Kecamatan Cijulang (bulan Muharam) oleh tokoh masyarakat/adat dilaksanakan tradisi ngabuku tahun dimana kegiatan membaca manuskrip Purwaning Jagat.
- Dengan realisasi tersebut capaian kinerja persentase pemajuan kebudayaan lokal masuk ke dalam kategori sedang.



Gambar 2.8 Realisasi Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal Tahun 2018-2021

Pada tahun 2018 ada 2 obyek pemajuan kebudayaan yang sudah ditangani atau dimajukan secara langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah Seni dan Ritus, terdapat kenaikan atau percepatan pencapaian kinerja sebanyak 3 objek pemajuan kebudayaan tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 1 objek yaitu manuskrip yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Cijulang dan dukungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam hal ini membantu menginventarisasi serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan. Sejak tahun 2020 setelah pada bulan Maret diumumkan tentang Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia banyak kegiatan yang dibatasi pelaksanaannya dan sumberdaya pendukungnya, hal tersebut juga berpengaruh pada capaian kinerja sasaran strategis 2 yakni persentase objek pemajuan kebudayaan lokal. Sehingga pada tahun 2021 objek pemajuan yang dikembangkan yakni belum bisa bertambah dan masih sama dengan tahun 2020. Pelaksanaan kegiatan masih terbatas dan pengembangan pada beberapa objek pemajuan kebudayaan yang sama, namun pembaharuan database kebudayaan melalui inventarisasi budaya lokal tetap dengan sumberdaya yang ada tetap dilakukan.

Sampai akhir periode Renstra perubahan tahun 2018-2021 masih ada 20% atau 2 objek pemajuan yang belum dikembangkan.

Beberapa faktor penghambat terhadap capaian target tahun 2021 antara lain:

1. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 yang mengharuskan semua kalangan untuk membatasi kegiatan yang dilaksanakan, begitupula kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran serta masyarakat setempat;
2. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dalam mengoptimalkan inventrisasi dan mengklasifikasikan objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Pangandaran sebagai bahan pengembangan objek pemajuan kebudayaan yang menyeluruh;

Solusi atau upaya untuk perbaikan kineja kedepannya antara lain:

1. Pemutakhiran database kebudayaan yang ada di Kabupaten Pangandaran;
2. Inventarisasi kebudayaan yang ada sebagai langkah awal dalam pelesatrian dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan;
3. Edukasi kepada generasi muda tentang kebudayaan lokal salah satunya melalui pertunjukan seni sehingga kedepannya generasi mudah lebih peduli dan menggali serta mau mempelajari seni dan budaya tradisional di Kabupaten Pangandaran serta secara perlahan dapat mengapresiasi seni dan kreatifitas Karya Budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Pangandaran.



Gambar 2.9 Tarian Pada saat Penyambutan Acara

2.3.3 Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif

Untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang terbagi ke dalam 17 subsektor, diperlukan sumber daya manusia memiliki kompetensi yang baik dengan daya inovatif dan kreativitas yang tinggi. Selain sumber daya manusia tentu hal-hal lain juga diperlukan dalam pengembangan tersebut seperti insfrastuktur, alat dan wadah untuk sumber daya manusia tersebut berkreasi. Kebijakan dibidang ekonomi kreatif sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Adapun subsektor ekonomi kreatif yaitu:



Pengembangan Permainan, Kriya, Desain Interior, Musik, Seni Rupa, Desain Produk, Fesyen, Kuliner, Film, Animasi dan Video, Fotografi, Desain Komunikasi Visual, Televisi dan Radio, Arsitektur, Periklanan, Seni Pertunjukan, Penerbitan, Aplikasi.

Gambar 2.10 Subsektor Ekonomi Kreatif dan Pembinaan Pelaku Kreatif Tahun 2021

Dari database awal tahun 2018 ada 240 pelaku ekonomi kreatif yang berada di Kabupaten Pangandaran yang terdata. Pada tahun 2018 yang telah dibina sebanyak 65 pelaku ekonomi kreatif dan 30 pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2019, 15 pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2020 dan 15 pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2021 apabila dijumlahkan pelaku ekonomi kreatif yang telah dibina sampai tahun 2021 sebanyak 125 pelaku ekonomi kreatif, jadi capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 74,40% masuk ke dalam kategori tinggi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 17,26%, penurunan capaian pada tahun 2021 dikarena sumber daya yang dimiliki belum bisa mendukung secara optimal pada sasaran meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif.

Beberapa faktor penghambat terhadap capaian yang belum melebihi target pada tahun 2021 antara lain:

1. Dampak pandemic covid-19 yang terjadi dari awal tahun 2020 sampai saat ini;
2. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki sehingga dukungan untuk pelaku ekonomi kreatif belum bisa diberikan secara maksimal;

Solusi atau upaya untuk perbaikan kinerja kedepannya antara lain:

1. Memaksimalkan sumberdaya yang ada, seperti pelatihan yang dilakukan tidak hanya mengandalkan sumber dana dari APBD;
2. Pemutakhiran database pelaku ekonomi kreatif sebagai salah satu bahan pertimbangan pengembangan ekonomi kreatif;
3. Inventraisasi sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pangandaran sebagai wadah berekspresi pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Pangandaran.

2.3.4 Jumlah PAD sektor Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pariwisata (retribusi wisata) dihitung berdasarkan jumlah dari setiap jenis kendaraan/orang yang masuk ke 5 daya tarik wisata yang

dikelola Pemerintah Daerah dikalikan dengan harga tiket dari masing-masing jenis kendaraan/orang. adapun 5 (lima) daya tarik wisata yang dikelola Pemerintah Daerah dan menjadi sumber PAD sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Pantai Karapyak yang berada di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
2. Pantai Pangandaran yang berada di wilayah tiga Desa yaitu Desa Pananjung, Desa Pangandaran dan Desa Cikembulan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
3. Pantai Batuhiu yang berada di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
4. Green Canyon yang berada di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
5. Pantai Batukaras yang berada di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Berikut realisasi jumlah PAD sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Jumlah PAD Sektor Pariwisata

No	Daya Tarik Wisata	Realisasi PAD Pariwisata			
		2018	2019	2020	2021
1	Pantai Pangandaran	13.949.525.000	13.326.055.000	10.185.207.500	12.533.140.000
2	Pantai Karapyak	968.037.000	941.513.000	988.259.500	1.287.752.000
3	Pantai Batukaras	2.976.225.000	2.604.620.000	1.746.387.500	1.899.115.000
4	Pantai Batu Hiu	1.090.380.000	902.520.000	545.563.750	698.210.000
5	Cukang Taneuh/Green Canyon	829.480.250	698.150.000	321.150.000	283.850.000
Jumlah		19.813.647.250	18.472.858.000	13.786.568.250	16.702.067.000

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (DataTerbaru)

Pada tahun 2021 target PAD dalam rencana startegis sebesar Rp. 30.000.000.000,00 namun didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 target PAD sebesar Rp. 15.000.000.000,00 . Jumlah PAD dari sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran sampai tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 16.702.067.000,00 (setelah pemeriksaan BPK ada penyesuaian) dengan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan target Renstra sebesar 55,67% dengan kategori rendah dan apabila dibandingkan dengan target DPPA Tahun 2021 sebesar 111,35% dengan kategori pencapain sangat baik. Terjadi kenaikan jumlah PAD pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 2.915.498.750,00.



Gambar 2.11 Realisasi Jumlah PAD Sektor Pariwisata

Realisasi PAD sektor pariwisata selama empat tahun terakhir paling tinggi tahun 2018 sebesar Rp 19.813.647.250 kemudian tahun 2019 sebesar Rp 18.472.858.000 tahun 2021 sebesar Rp 16.702.067.000 dan tahun 2020 (Awal Pandemi covid-19) sebesar Rp 13.786.568.250.

Selain karena pandemi covid-19 banyak hal yang mempengaruhi ketidaktercapaian Jumlah PAD Sektor Pariwisata sesuai dengan rencana startegis , diantaranya :

1. Wisawatan sebagian besar hanya mengetahui Pangandaran sebagai destinasi wisata yang mengandalkan daya tarik wisata pantai dan bahari, padahal ada banyak daya tarik wisata lainnya seperti desa wisata, wisata petualang, wisata gua dan lain sebagainya;
2. Pertimbangan jarak tempuh menuju pangandaran dan pilihan moda transportasi menuju Kabupaten Pangandaran dan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran masih terbatas;
3. Belum meratanya pengembangan fasilitas wisata di destinasi wisata seperti ketersediaan dan variasi akomodasi menimbulkan penumpukan wisatawan di satu destinasi wisata yaitu Pantai Pangandaran dan kurangnya ketersediaan lahan parkir yang nyaman terutama di Pantai Pangandaran menjadi salah satu penyebab kemacetan ketika volume kendaraan naik pada liburan panjang seperti libur hari raya, tahun baru dan libur sekolah;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan event-event wisata yang bersifat viral dan massif baik dalam skala nasional ataupun internasional yang mampu menarik wisatawan baik pada musim liburan ataupun musim sepi kunjungan;
5. Banyaknya informasi isu-isu bencana dan berita hoax yang belum optimal dalam penanganannya, ditambah lagi dengan kondisi alam yang tidak menentu menjadi salah satu pengaruh untuk berkunjung ke Kabupaten Pangandaran.

Solusi atau upaya untuk perbaikan kinerja kedepannya antara lain:

1. Mengoptimalkan promosi pariwisata melalui media online;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata salah satunya dengan pengembangan daya tarik wisata/atraksi, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum dan penataan destinasi pariwisata;

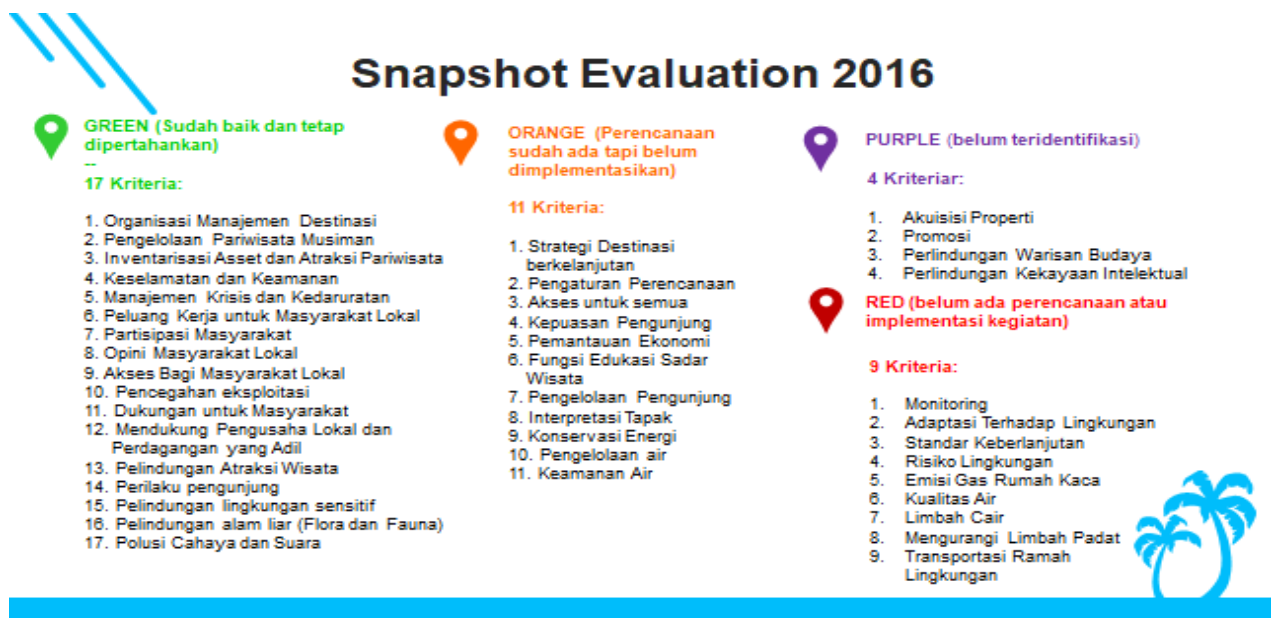
3. Mempermudah pergerakan wisatawan menuju ke Kabupaten Pangandaran dan destinasi pariwisata dilakukan dengan cara peningkatan aksesibilitas seperti perbaikan akses menuju Pangandaran atau destinasi wisata yang ada di Pangandaran;
4. Meningkatkan Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan edukasi kepada masyarakat.
5. Mengembangkan pasar dengan fokus pada kepuasan wisatawan, ketika harapan wisatawan terhadap destinasi dan pelayanan wisata yang diberikan sesuai, kemungkinan besar mereka akan berkunjung kembali serta akan merekomendasikan destinasi wisata kita kepada wisatawan lain (promosi dari mulut ke mulut).
6. Mengembangkan pengelolaan destinasi wisata musiman dengan menciptakan event-event yang bersifat viral dan massif yang dapat menarik wisatawan untuk datang pada musim sepi kunjungan dan menambah lama tinggal wisatawan pada musim libur.
7. Mengembangkan sistem informasi terpadu dan sistem respon cepat dalam pemberian informasi dan klarifikasi akan suatu pemberitaan terutama isu-isu negative atau hoaxes sehingga isu-isu negative dan informasi yang tidak benar dapat diminimalisir.

2.3.5 Persentase pemenuhan kriteria GSTC-D sektor pariwisata

GSTC-D diciptakan dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman umum tentang pariwisata berkelanjutan. Kriteria GSTC-D merupakan upaya minimum yang perlu dicapai oleh setiap organisasi manajemen pariwisata ketika mempertimbangkan keberlanjutan dalam praktik mereka. Untuk memenuhi definisi pariwisata berkelanjutan, destinasi harus mengambil pendekatan interdisipliner, holistik dan integratif yang meliputi empat tujuan utama yaitu :

1. Mendemonstrasikan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan;
2. Memaksimalkan manfaat ekonomi untuk masyarakat lokal dan meminimalkan dampak negatif;
3. Memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, pengunjung dan budaya, serta meminimalkan dampak negatif;
4. Memaksimalkan manfaat bagi lingkungan dan meminimalkan dampak negatif.

Kriteria GSTC-D dirancang untuk dapat digunakan oleh semua jenis dan skala destinasi. Lokasi yang dijadikan target destinasi berkelas dunia sesuai dengan kriteria *GSTC Destination* (GSTC-D) yaitu Kawasan Wisata Pantai Pangandaran. Pada tahun 2016 dilakukan *Pangandaran Sustainable Tourism Destination Snapshot Evaluation* dengan menggunakan *Global Sustainable Tourism Criteria for Destination (version 1,1 November 2013)* combined with *Suggested performance Indicators (version 1,10 Desember 2013)* untuk menilai sejauh mana Kawasan Wisata Pangandaran memenuhi kriteria GSTC-D sehingga terlihat sejauh mana kesiapan Kabupaten Pangandaran untuk menjadi destinasi berkelas dunia. Dari 41 kriteria yang dievaluasi Kawasan Wisata Pangandaran memperoleh nilai sebagai berikut :



Gambar 2.12 Kriteria GSTC-D

Dari hasil evaluasi di atas maka persentase pemenuhan kriteria GSTC-D yang dicapai sampai Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata berkelas dunia sebesar 41,46 % dimana Dari 41 kriteria GSTC-D yang dievaluasi di Kabupaten Pangandaran memperoleh 17 kriteria GSTC-D yang dianggap baik (Hijau).

Pada Tahun 2018 setidaknya ada 7 kriteria GSTC-D yang berusaha untuk dipenuhi meliputi :

1. Promosi;
2. Perlindungan Warisan Budaya;
3. Strategi Pengembangan Destinasi Berkelanjutan;
4. Kepuasan Pengunjung;
5. Fungsi Edukasi dan sadar wisata;
6. Monitoring;
7. Regulasi Perencanaan.

Sedangkan tahun 2019 setidaknya ada 2 kriteria yang berusaha dipenuhi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yaitu:

1. Akses Untuk Semua;
2. Pengelolaan Pengunjung.

Jika dianalisis dan dievaluasi sampai tahun 2021 ada 17 kriteria yang sudah hijau dan penambahan pemenuhan 9 kriteria GSTC-D yang berusaha dipenuhi supaya masuk ke kategori hijau dengan menggunakan penilaian mandiri diharapkan dapat mengalami kenaikan menjadi 26 kriteria dengan kategori baik sehingga capaiannya menjadi sebesar 63,41%. Pada tahun 2019 daya Tarik wisata alam Green Canyon mendapatkan penghargaan *Green Bronze* dalam ajang ISTA yang kriteria dan indikator penilaiannya diadopsi dari kriteria dan indikator GSTC-D.

Pada tahun 2021 kegiatan yang berhubungan dengan GSTC-D disiapkan untuk asesmen GSTC-D yang akan dilaksanakan oleh Bidang Destinasi Pariwisata. Namun situasi yang belum sepenuhnya seperti dahulu dan sumber daya terbatas menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan asesmen GSTC-D di Pangandaran. Agar mencapai target pemenuhan kriteria GSTC-D

100% maka diperlukan kerjasama semua pihak terutama dukungan lintas sektor. Salah satu strategi yang dapat mempercepat pemenuhan kriteria dimaksud adalah dengan membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor untuk menjadikan destinasi wisata Pantai Pangandaran berkelas dunia merujuk pada kriteria GSTC-D.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021**	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.435.142.620	822.433.042	1.269.032.786	7.440.865.671	1.279.841.430	795.206.943	1.201.659.022	3.370.571.971	89%	97%	95%	45%	81%	80%
2	Persentase Pemajuan Kebudayaan lokal	753.684.900	788.952.000	758.398.800	1.847.447.000	741.878.000	786.666.400	757.503.800	493.251.450	98%	100%	100%	27%	81%	77%
3	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	273.359.200	20.000.000	36.117.500	744.458.713	272.352.200	20.000.000	34.632.500	392.324.285	100%	100%	96%	53%	87%	84%
4	Jumlah PAD sektor Pariwisata	4.606.218.380	48.754.040.958	16.409.549.971	19.788.870.025	4.423.546.387	46.045.031.163	11.755.647.172	2.682.938.788	96%	94%	72%	14%	69%	62%
5	Persentase Pemenuhan Kriteria GSTC-D sektor Pariwisata	-	2.346.204.880	1.426.950.014	615.411.500	-	2.326.529.480	1.397.856.028	188.683.500	0%	99%	98%	31%	57%	71%

**Realisasi Untuk Tahun 2021 Menggunakan Realisasi Sampai Dengan Triwulan III 2021

Secara keseluruhan rasio antara realisasi dengan anggaran pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama empat tahun terakhir tidak terlalu jauh, namun pada tahun 2019 mendapatkan rasio paling tinggi dibandingkan dengan tahun 2018, 2020 dan 2021. Beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya sumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi dan DAK Fisik dan Non Fisik serta skala prioritas pada saat keadaan darurat seperti ketika terjadinya bencana alam dan non alam (Pandemi covid-19 yang dimulai pada tahun 2020). Anggaran yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi dan dana alokasi khusus fisik dan non fisik besaran setiap tahunnya yang berbeda tentu juga mempengaruhi ketersediaan anggaran pendukung pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terutama untuk bidang tertentu, kemudian untuk anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran terbatas dan pertimbangan skala prioritas disetiap tahunnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Pelayanan yang harus diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah pelayanan umum di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan. Dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran terdapat tantangan dan peluang dalam pengembangannya.

Berikut beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran:

1. Visi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa” merupakan tantangan tersendiri bagi pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pangandaran.
2. Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran harus tetap memperhatikan dan menerapkan kelestarian alam dan berkelanjutan;
3. Kondisi pasar wisata saat ini sudah mulai berubah, penerapan *digital tourism* di Kabupaten Pangandaran menjadi keniscayaan sebagai strategi untuk merebut pasar dalam persaingan global. Kondisi SDM dan masyarakat yang masih konvensional merupakan tantangan tersendiri bagi pengembangan *digital tourism* di Kabupaten Pangandaran;
4. Kabupaten Pangandaran belum mempunyai regulasi kepariwisataan yang lengkap, sehingga perlu dilakukan deregulasi jika pariwisata ingin lebih maju dan berkembang yang berdasarkan kajian;
5. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam, budaya, dan manusia. Kabupaten Pangandaran memiliki masyarakat yang dinamis dan kompleks. Pengembangan kepariwisataan memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah maupun stakeholder kepariwisataan lainnya;
6. Destinasi Kabupaten Pangandaran pada umumnya berada di lokasi yang rawan bencana, maka diperlukan suatu penanganan ketanggapdaruratan yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan;

7. Tantangan yang dihadapi mengenai pelaku industri kreatif adalah bermunculannya SDM asing yang memiliki kreativitas tinggi dan penguasaan teknologi maju;
8. Masuknya budaya barat yang baik yang bersifat mengakulturasi budaya lokal maupun substitusi merupakan tantangan bagi pengembangan usaha kreatif yang berdasarkan pada budaya lokal;
9. Sikap Intoleransi yang kini mulai merebak di masyarakat menjadi perhatian dan dinilai menjadi salah satu tantangan bagi pemajuan kebudayaan;
10. Kecintaan dan pemahaman kita akan kebudayaan daerah Pangandaran semakin hilang arah. Generasi muda lebih memilih budaya kebarat-baratan daripada budaya tradisional setempat;
11. Para wisatawan datang selain bertujuan untuk melakukan kegiatan wisata juga bisa membawa perubahan-perubahan bagi masyarakat lokal;
12. Semakin lunturnya nilai-nilai karakter bangsa seiring mudarnya nilai-nilai budaya di tengah kehidupan kita sehari-hari;
13. Pemahaman tentang penting pemajuan kebudayaan dalam rangka pembangunan nasional belum menyeluruh;
14. Belum kuatnya kelembagaan bidang kebudayaan di Kabupaten Pangandaran dan alokasi anggaran pemajuan kebudayaan yang masih rendah.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Pangandaran berada di lokasi strategis, terletak di Jalur Selatan Jawa Barat (Jabar Selatan) yang terbentang di bagian selatan Pulau Jawa dan menghubungkan Sukabumi sampai Pangandaran dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, sehingga potensi pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur sangat tinggi seperti rencana pengembangan bandara Nusawiru, keberadaan pelabuhan internasional yang sedang dibangun, rencana pengaktifan kembali jalur kereta api Banjar-Pangandaran dan rencana pembangunan jalur cepat Tasikmalaya-Cilacap. Wisatawan akan lebih mudah mengunjungi Kabupaten Pangandaran jika didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang sangat memadai dan bervariasi;
2. Potensi daya tarik wisata yang sangat beragam, dari mulai daya tarik wisata alam dan budaya. Jika dikembangkan dengan baik akan memberikan nilai tambah dan daya saing bagi Kabupaten Pangandaran;
3. Kabupaten Pangandaran memiliki kurang lebih 91KM garis pantai yang membentang dari Kecamatan Kalipucang sampai Kecamatan Cimerak, selain itu juga memiliki banyak alur sungai, gua, budaya masyarakat, kuliner dan wisata buatan yang dapat memperkaya variasi destinasi wisata;
4. Kabupaten Pangandaran memiliki sarana dan prasarana kepariwisataan yang cukup lengkap dibanding destinasi wisata di kabupaten sekitarnya, hal ini dapat memberikan nilai daya

- saing bagi destinasi wisata. Kabupaten Pangandaran menawarkan berbagai pilihan fasilitas wisata dengan harga yang kompetitif dengan pelayanan yang bervariasi;
5. Pariwisata menjadi sektor andalan di Kabupaten Pangandaran sehingga peluang untuk pengembangan kepariwisataan terbuka lebar karena mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah;
 6. Diawali dari perbedaan kondisi alam, maka melahirkan perbedaan adat istiadat, perbedaan kepercayaan, perbedaan pandangan hidup, maka menimbulkan perbedaan corak perikehidupan yang memiliki kekhasan. Corak yang khas tersebut memiliki keunikan produk yang merupakan syarat bagi keunggulan bersaing suatu produk. Keragaman budaya inilah yang merupakan peluang besar;
 7. Terbukanya pasar produk kreatif di dalam dan luar negeri;
 8. Masyarakat Kabupaten Pangandaran merupakan bangsa yang kreatif, hal ini dapat dilihat dari ragam budaya bangsa hasil cipta, karya dan karsa yang diturunkan secara turun-temurun diwariskan nenek moyang;
 9. Kabupaten Pangandaran sedang giat-giatnya membangun, pengembangan infrastruktur sekaligus dapat mempermudah menggali potensi daerah dan memajukan usaha kreatif yang berbasis kearifan lokal dan kekhasan wilayah.;
 10. Maraknya lembaga pembiayaan yang membuka diri untuk membiayai investasi di usaha kreatif merupakan peluang bagi perkembangan industri kreatif;
 11. Pemajuan kebudayaan bisa menjadi jalan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi kesenjangan masyarakatnya;
 12. Kabupaten Pangandaran memiliki potensi kebudayaan yang sangat tinggi, hal ini dapat dijadikan modal dasar dalam pemajuan kebudayaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran**
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis**



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, selain permasalahan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah juga berbagai permasalahan dalam pemberian pelayanan.

Permasalahan pengembangan sektor pariwisata yang meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan industri pariwisata dan pengembangan kelembagaan pariwisata sebagai berikut:

1. Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - a. Perubahan Iklim dan Bencana Alam;
Isu perubahan iklim dan bencana alam yang terjadi merupakan hal yang sangat rentan bagi destinasi pariwisata Kabupaten Pangandaran, karena Pangandaran masih mengandalkan wisata bahari sebagai primadona pariwisatanya. Seperti diketahui bencana alam Tsunami yang pernah terjadi tahun 2006 silam masih tergambar dengan jelas bagi banyak orang, jadi apabila terjadi gempa atau tsunami di daerah lain sangat berpengaruh juga terhadap kunjungan wisatawan ke destinasi yang ada di Kabupaten Pangandaran. Belum lagi ditambah dengan berita *hoax* yang *counteringnya* belum terkelola dengan optimal.
 - b. Ketersediaan konektivitas dan infrastruktur yang belum optimal;
Untuk sampai ke Kabupaten Pangandaran secara langsung hanya ada 2 jalur yakni darat dan udara, untuk jalur udara maskapai dan jam terbang sangat terbatas. Begitupun akses untuk menuju daya tarik wisata pun masih terbatas tidak semua daya tarik wisata yang ada di Pangandaran bisa ditempuh dengan kendaraan umum, pembangunan atau ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas pariwisata belum menyeluruh sehingga hal itu bisa mengganggu kenyamanan wisatawan yang akan berkunjung.
 - c. Kesiapan masyarakat disekitar Destinasi Pariwisata belum optimal;
Hal ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat pada perawatan atau pemeliharaan sarana dan prasarana umum di destinasi wisata, sehingga diperlukan pemberdayaan dan pemberian pemahaman (edukasi) kepada masyarakat sekitar supaya sama-sama merasa memiliki dan menjaga destinasi wisata yang ada. Masyarakat belum bisa melihat potensi di daerahnya, sehingga pengembangan daya tarik wisata terutama di desa wisata belum muncul. Kebanyakan masyarakat hanya mampu menjual wisata alam dan kurang mampu menjual kegiatan dan kearifan lokal sebagai sebuah daya tarik wisata.
 - d. Pemenuhan kriteria berkelanjutan (GSTC-D) belum optimal;
Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan visi tahun 2016-2021 kalimat berkelas dunia adalah dengan memenuhi standar GSTC-D. Pada tahun 2016 pangandaran

menjadi pailed project untuk assesment pemenuhan kriteria GSTC-D dengan 41 kriteria adapun hasil yang dicapai adalah 17 kriteria masuk kategori hijau, 6 kategori ungu, 11 kriteria masuk kategori orange dan 9 kriteria masuk kategori merah. Sampai tahun 2021 awal belum dilakukan lagi *assessment* karena berbagai faktor belum lagi pemahaman tentang GSTC-D belum meyuluruh dipahami oleh pegawai yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya dan pegawai di lintas sektoral umumnya karena kriteria GSTC-D dialamnya bukan hanya urusan pariwisata namun ada OPD lain yang terkait.

2. Permasalahan Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - a. Belum tersedianya acuan riset pasar yang komprehensif;
Dalam menetapkan pasar wisatawan belum mengacu pada analisis pasar yang dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak mencapai kepada kedalaman informasi yang diharapkan.
 - b. Strategi komunikasi pemasaran yang belum terpadu;
Belum adanya *branding* pariwisata pangandaran untuk mewakili citra dari pariwisata Pangandaran, Pangandaran juga belum memiliki strategi komunikasi pemasaran yang bisa digunakan oleh semua pihak baik Disparbud, SKPD lain dan pemangku kepentingan yang lainnya.
 - c. Sinergi kemitraan pemasaran yang belum optimal;
Pusat informasi pariwisata masih bersifat parsial penggunaanya belum optimal, belum terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah karena berbagai hal serta belum terjalinnya kerjasama antara pemerintah dan asosiasi atau organisasi pariwisata dalam promosi pariwisata Kabupaten Pangandaran.
 - d. Kegiatan promosi masih berjalan parsial;
Masih terbatasnya penyelenggara event baik yang bersifat nasional ataupun internasional, belum adanya event yang bersifat massive serta banyak event yang menarik namun waktu pelaksanaan yang tidak pasti serta pengemasan acara yang belum optimal.
3. Permasalahan Pengembangan Industri Pariwisata
 - a. Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal;
Hal ini terlihat dari belum optimalnya koordinasi yang intensif dan kemitraan atau kerjasama antara pelaku industri pariwisata.
 - b. Daya saing produk wisata yang belum optimal;
Daya saing produk wisata salah satunya dapat dilihat dari masih terbatasnya aksesibilitas menuju Pangandaran dan daya tarik wisata yang ada di Pangandaran.
 - c. Kesenjangan antara tingkat harga dengan pengalaman wisata;
Harga yang diterima oleh wisatawan kadang tidak sebanding dengan pengalaman yang didapatkan oleh wisatawan seperti pada musim musim tertentu beberapa destinasi wisata di Pangandaran sangat penuh sehingga membuat wisatawan berdesak desakan

sehingga mempengaruhi kenyamanan wisatawan. Belum lagi harga makanan di destinasi wisata yang belum bersaing membuat wisatawan membawa bekal sendiri atau membeli makanan di minimarket.

- d. Pengembangan tanggungjawab lingkungan oleh kalangan usaha pariwisata belum optimal;
Masih sedikitnya usaha pariwisata yang memiliki komitmen terhadap tanggungjawab lingkungan seperti halnya dalam pembuangan limbah dan penggunaan air tanah serta masih kurangnya CSR dalam pemberdayaan masyarakat lokal.
 - e. Kebijakan pengembangan industri pariwisata
Kebijakan tentang pengembangan industri pariwisata belum menyeluruh, sehingga pengaturan untuk usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran cukup sulit.
4. Permasalahan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
- a. Belum meratanya penguatan organisasi pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran;
Penguatan organisasi pariwisata masih terbatas pada satu atau dua organisasi saja karena keterbatasan sumber daya.
 - b. Sumber daya manusia dan pengembangan pariwisata yang masih terbatas;
Pelatihan ataupun pengembangan kapasitas yang dilaksanakan masih terbatas, sertifikasi yang diberikan kepada sumber daya manusia pariwisata di Kabupaten Pangandaran masih mengandalkan bantuan baik dari provinsi ataupun pusat. Padahal dengan akan diberlakukannya kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) maka tuntutan SDM yang ada di Kabupaten Pangandaran khususnya SDM Pariwisata harus memiliki kompetensi dan mampu berdaya saing dengan SDM dari luar Negeri.

Permasalahan pengembangan ekonomi kreatif terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi meliputi:

- a. Penyediaan data dan informasi ekonomi kreatif yang masih terbatas;
Belum adanya data dan informasi ekonomi kreatif yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan tentang ekonomi kreatif di Kabupaten Pangandaran.
- b. Belum adanya riset untuk pengembangan ekonomi kreatif;
Riset untuk pengembangan dan pemasaran produk ekonomi kreatif belum pernah dibuat dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada begitupun untuk pengembangan trend produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan.
- c. Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif yang perlu ditingkatkan;
Masih terbatasnya pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.
- d. Belum adanya akses untuk pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pendanaan dan pembiayaan;
Belum adanya kerjasama atau skema khusus untuk membantu sumber pendanaan atau pembiayaan untuk para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pangandaran.
- e. Infrastruktur yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif masih terbatas;

- Pangandaran belum memiliki creative space sebagai wadah untuk para pelaku kreatif dalam mengembangkan dan memasarkan produk mereka.
- f. Produk ekonomi kreatif belum begitu dikenal baik dan dikonsumsi oleh sekitar warga Kabupaten Pangandaran maupun luar Pangandaran;
 - g. Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas.

Permasalahan pengembangan kebudayaan terdapat beberapa permasalahan utama yang harus dihadapi:

- a. **Pelestraian Kebudayaan Lokal Belum Optimal**
Inisiasi pelaku budaya masih banyak yang dilakukan secara mandiri dan kurang tersinergi, sementara itu peran pemerintah juga belum optimal dalam upaya memberdayakan serta melibatkan para pelaku tersebut.
- b. **Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya Belum Optimal**
Keterbatasan sarana dan prasarana budaya merupakan salah satu kendala dalam mengembangkan dan menghasilkan seni dan karya budaya.
- c. **Pelestarian Warisan Budaya belum optimal**
Ketersediaan database warisan budaya yang masih terbatas serta belum tersedianya sarana dan prasarana untuk pengarsipan atau penyimpanan warisan budaya. kesulitan dalam mengelola warisan budaya yang ada.
- d. **Belum Optimalnya Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya**
 - 1) Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang kekayaan budaya Kabupaten Pangandaran sehingga representasi budaya di luar daerah maupun di luar negeri dan apresiasi terhadap kebudayaan local Pangandaran masih terbatas;
 - 2) Belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pelaku budaya Kabupaten Pangandaran pada even budaya di luar daerah maupun luar negeri;
 - 3) Di samping itu pemanfaatan promosi budaya Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan berbagai media, baik nasional maupun internasional, belum optimal.
- e. **Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan belum Maksimal**
 - 1) Terbatasnya sumber daya manusia kebudayaan, sehingga belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah;
 - 2) Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan lokal pangandaran;
 - 3) Terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi oleh masyarakat kabupaten pangandaran;
 - 4) Terbatasnya dukungan peraturan perundangan daerah yang khusus tentang kebudayaan;

- 5) Belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan;
- 6) Belum optimalnya koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah sertabelum optimalnya kerja sama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat di Kabupaten Pangandaran baik dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal.
- 7) Peningkatatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan masih terbatas.
- 8) Belum adanya pemberian anugerah budaya (Maestro) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pangandaran. Sehingga penetapan penganuerahanh dari provinsi maupun pusat menjadi tersendat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026 yaitu:

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

Pangandaran Juara	:	Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain
Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	:	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya

berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.

Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa : Nilai (*value*) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya.

Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran tersebut selaras dengan Visi Daerah Jangka Panjangnya, yaitu “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”. Kriteria capaian Visi Daerah Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Pangandaran tersebut telah secara jelas direfleksikan dalam Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran yang mengacu kepada potensi sumberdaya alam yang dimiliki diantaranya pantai, laut, sungai, perbukitan, air terjun dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah, serta potensi sumberdaya manusia, antar lain beraneka ragam budaya dan kesenian lokal serta segenap komoditas hasil bumi maupun budidaya masyarakat yang mempunyai ciri khas di wilayah Kabupaten Pangandaran. Kesemua potensi tersebut apabila dikelola, ditata dan dikembangkan secara optimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang

harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2016, sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama

Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan di suatu daerah. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khusus atau khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ramah, mawas diri, dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa depan. Bertumpu pada nilai-nilai tersebut, dapat diyakini akan memunculkan tatanan masyarakat yang tenteram, tertib, toleransi dan saling menghargai terhadap kesetaraan gender.

- 2) Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan

Pariwisata merupakan sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada peluang perluasan lapangan kerja. Pembangunan berbasis pengembangan wisata memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan berbasis wisata merupakan sebuah kerangka yang dapat digunakan pemerintah untuk menggali serta mengembangkan industri pariwisata secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya pengembangan dan penguatan daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran.

- 3) Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan

Sebagai bentuk perwujudan memperluas akses masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan hingga perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia atau *human resource* akan berkontribusi besar memberikan dampak bagi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam misi kedua ini terfokus pada penguatan sumber daya manusia yaitu pada pengembangan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.

- 4) Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal

Stabilitas dan ketahanan ekonomi dapat ditentukan dari kondisi makro ekonomi yang meliputi kebijakan jangka menengah ke panjang, kinerja pemerintah dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ketahanan ekonomi daerah dilihat melalui indikator laju inflasi, PDRB, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal. Hal ini guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

5) Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu pembaharuan dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah harus dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan proses serta hasil akhir (output) yang menggambarkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan.

6) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan

Misi keenam ini terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan. Pada hal ini Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur sebagai pendorong pengembangan sektor pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan bencana perlu adanya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari pasca bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini.

Melihat Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mempunyai suatu peran penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut yaitu menjalankan Misi Ke-2 yaitu “Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan” , jadi misi ke-2 akan menjadi fokus pekerjaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran selama lima tahun kedepan yakni tahun 2021-2026. Selain itu Disparbud Kabupaten Pangandaran berkontribusi secara tidak langsung terhadap pencapaian MISI Ke-5 yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel”.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dapat dirumuskan bahwa ada beberapa permasalahan utama yang menjadi penghambat dari pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Pemenuhan kriteria berkelanjutan dalam pengembangan destinasi pariwisata belum optimal;
2. Perlunya optimlaisasi pengembangan potensi daya tarik wisata sebagai alternatif pilihan selain wisata bahari;
3. Ketersediaan konetivitas dan infrastruktur yang belum optimal;
4. Daya dukung kawasan wisata belum optimal (kemacetan dan *over carrying capacity* yang terjadi di beberapa destinasi pariwisata pada saat *peak season*, degradasi lingkungan dan penurunan kualitas daya tarik wisata);
5. Dukungan dalam pengembangan strategi pemasaran pariwisata belum optimal (seperti belum adanya *branding* khusus promosi pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah);
6. Pemasaran pariwisata masih parsial;
7. Belum adanya penyelenggaraan event wisata, event kreatif dan event budaya yang bersifat massive yang menarik kunjungan wisatawan;
8. Daya saing produk wisata belum optimal (aksesibilitas menuju Kabupaten Panganadran dan menuju daya tarik wisata masih sangat terbatas);
9. Perlunya peningkatan kerjasama kemitraan usaha dan lembaga pariwisata;
10. Peningkatan kompetensi SDM pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan masih belum optimal;
11. Ketersedian infrastruktur ekonomi kreatif masih sangat terbatas;
12. Akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif masih sangat terbatas;
13. Intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya belum maksimal;
14. Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya belum optimal;
15. Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi belum optimal;
16. Cagar budaya yang dikelola secara terpadu belum optimal;
17. Pemafaatan dan pengembangan budaya lokal dalam mendukung pariwisata belum optimal.

Faktor pendorong pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Letak geografis Kabupaten Pangandaran yang memiliki garis pantai kurang lebih 91 KM;
2. Kabupaten Pangandaran yang masuk ke dalam KSPN, KPPN dan DPN;

3. Program Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam membangun destinasi pariwisata Kabupaten Pangandaran dan Sekitarnya melalui prinsip partisipatif, keterpaduan, kolaboratif dan berkelanjutan;
4. Kabupaten Pangandaran termasuk dalam Konstelasi Great Bandung, dengan penekanan terhadap pendistribusian wisatawan yang diharapkan mampu menyebar ke berbagai Destinasi Wisata di Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah Kabupaten Pangandaran;
5. Fokus Pengembangan Terkait Kabupaten Pangandaran adalah Kabupaten Pangandaran diarahkan sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional (Rencana tata ruang Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029);
6. Kawasan Andalan Nasional Priangan Timur-Pangandaran dan Penetapan Lokasi Kawasan Lindung Provinsi Jawa Barat;
7. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat bagi Kabupaten Pangandaran : Penanganan Ekonomi pada KSP Pangandaran yang diprioritaskan pengembangannya untuk mengurangi ketimpangan perekonomian Jawa Barat. Penanganan yang dilakukan : Mengembangkan kegiatan wisata pesisir dan minat khusus dan Menjaga kelestarian lingkungan pantai;
8. Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata;
9. Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan Pedesaan di Kab. Pangandaran;
10. Pembangunan pusat Kebudayaan di PKNp Pangandaran;
11. Program Perwujudan Struktur Ruang di Kab. Pangandaran : Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata berskala internasional Pangandaran dan Optimalisasi fungsi Bandar/Pangkalan Udara Nusawiru;
12. Perwujudan Ruang Investasi Sektor Perekonomian untuk Pariwisata: Peningkatan infrastruktur Pendukung Pariwisata Berstandar Internasional, Pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jatidiri masyarakat Jawa Barat, Pemasaran Wisata dalam Konsep Tourism, Trade and Investment (TTI) dan Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata;

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA

1. Telaahan Terhadap Renstra Kemenparekraf/Baparekraf dan Kemedikbud RI

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi kreatif Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Permenparekraf/KeBaparekraf RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Startegis Kemparekraf/Bapaarekraf tahun 2020-2024). Visi Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: “pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang maju, berdaya saing , berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal dalam mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Visi kemenparekraf/ baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (i) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang maju; (ii) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang berdaya saing; (iii) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang berkelanjutan; serta (iv) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang mengedepankan kearifan lokal

Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif BSC:

1. Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”.
2. Pada perspektif customer, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu: (1) “Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional”; (2) “Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan”; (3) “Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional”; (4) “Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan”; (5) “ Bertumbuh nya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional”; dan (6) “Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif”.
3. Pada perspektif internal process, Kemenparekraf/ Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: (1) “Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian”; (2) “Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif”; dan (3) “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”.
4. Pada perspektif learn and growth, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional”.

Dalam Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 Visi Kemedikbud adalah “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan

sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional.

Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi 35 nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. 2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. 3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024. 1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang. 2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang. 3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik. 4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. 5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Renstra Kemenparekraf/Baparekraf RI dan Renstra Kemendikbud RI secara tidak langsung merupakan inspirasi dan referensi penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dan keberadaan Renstra Disparbud Kab. Pangandaran tidak bertentangan dengan Renstra Kemenparekraf/Baparekraf RI dan Renstra Kemendikbud RI.

2. Telaahan Terhadap Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Visi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yakni:

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut: Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Perwujudan visi melalui 5 (lima) misi, yaitu: Misi Pertama, Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban; Misi Kedua, Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif; Misi Ketiga, Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah; Misi Keempat, Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat- Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan; dan Misi Kelima, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR/ TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pariwisata										
Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jawa Barat.	Meningkatnya daya tarik wisata	1. Jumlah kunjungan	Orang	1.750.000	1.830.000	30.000	30.000	33.000	36.300	36.300
		2. Jumlah kunjungan	Orang	46.704.790	49.000.000	15.000.000	30.000.000	36.000.000	39.600.000	39.600.000
Kebudayaan										
Meningkatkan ketahanan dan kontribusi seni budaya	Meningkatnya pengelolaan seni	Persentase Pengembangan Kebudayaan	Persen	4,55	16,42	8,07	19,56	24,89	24,17	24,21

Sumber: LKIP Disparbud Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sejalan dengan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yakni meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan ketahanan dan kontribusi seni budaya, beberapa faktor penghambat diantaranya belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan masih terbatasnya penyelenggaraan event budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Pangandaran didasarkan pada Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038. Pada bab iv pasal 4 dijelaskan Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan dan pada pasal 5 Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengembangan pusat kegiatan yang dilengkapi dengan sarana prasarana wilayah; b. pengembangan kawasan wisata berskala nasional dan internasional yang terintegrasi dan ramah lingkungan; c. peningkatan pelestarian dan pengelolaan kawasan lindung darat dan laut; d. pengembangan kawasan budidaya yang berkelanjutan berbasis sumber daya alam potensial; dan e. peningkatan mitigasi bencana dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu

wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Pada KLHS RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026, dijelaskan bahwa dari aspek lingkungan memang Kecamatan Pangandaran sudah memiliki kualitas lingkungan rendah dikarenakan tingginya pembangunan, meningkatnya aktivitas penduduk, tempat pariwisata dan sebagai tempat sumber pendapatan. Nilai jasa lingkungan disebut dengan Indeks Jasa Ekosistem (IJE). Tahap perhitungan IJE dari hasil persebaran Adapun sebaran jasa ekosistem di Kabupaten Pangandaran rata-rata termasuk ke dalam kelas rendah hingga sedang. Hal ini menandakan bahwa secara rata-rata kualitas jasa ekosistem di Kabupaten Pangandaran sudah rawan kualitas lingkungannya. Harus ada upaya-upaya untuk melindungi karena mungkin saja dengan adanya pembangunan yang meningkat tanpa adanya upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup akan menyebabkan manfaat ekosistem yang tersedia di alam akan semakin menurun dan sudah tidak bisa mendukung aktivitas makhluk hidup di atasnya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup, seperti banjir, kekurangan air bersih, udara yang tidak sehat, biodiversitas menurun, kondisi perubahan iklim yang tidak dapat terkontrol dan sebagainya. Adapun berikut diagram dan peta yang memberikan gambaran kondisi jasa ekosistem di Kabupaten Pangandaran. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal

Hasil telaahan pada RTRW dan KLHS RPJMD dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata selain peningkatan daya saing harus berkelanjutan, penerapan pariwisata berkelanjutan sejak tahun 2016 sudah diterapkan dengan Pangandaran dijadikan sebagai *pailed project assessment* untuk penerapan kriteria berkelanjutan dengan menggunakan kriteria GSTC-D. Kedepannya bagaimana pariwisata sebagai sektor andalan di Kabupaten Pangandaran mampu berkontribusi maksimal terhadap peningkatan PDRB, dengan pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata, optimalisasi potensi daya tarik wisata baik pengembangan ataupun pengelolaannya serta pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan budaya lokal secara menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud, dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah.

Rumusan isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Analisis isu-isu strategis dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Keudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT yang meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal, penetapan permasalahan pembangunan daerah serta mengidentifikasi isu - isu strategis pembangunan daerah.

Table 3.2
Matrik Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)

	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakneses)
Analisis Lingkungan Internal (IFAS) Analisis Lingkungan External (EFAS)	1. Daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran tersebar diseluruh Kecamatan; 2. Kabupaten Pangandaran memiliki garis sepadan pantai sepanjang kurang lebih 91 KM dari Kecamatan Kalipucang-Kecamatan Cimerak; 3. Primadona wisata bahari di Provinsi Jawa Barat; 4. Memiliki Bandar Udara Nusawiru; 5. Sudah menerapkan konsep berkelanjutan dalam pengembangan destinasi pariwisata; 6. Memiliki budaya baik benda dan tak benda yang beragam;	1. Pengembangan potensi daya tarik wisata belum optimal; 2. Ketersediaan konektivitas dan infrastruktur yang belum optimal (rendahnya kualitas aksesibilitas menuju Kabupaten Pangandaran dan menuju lokasi daya tarik wisata); 3. Daya dukung kawasan wisata belum optimal; 4. Daya saing produk wisata belum optimal; 5. Kompetensi dan daya saing SDM pariwisata dan ekonomi kreatif perlu diingkatkan; 6. Pemasaran pariwisata masih bersifat parsial; 7. Pemerataan sarana dan prasarana di daya tarik wisata masih terbatas; 8. Kerjasama usaha pariwisata dan penguatan kelembagaan pariwisata masih belum optimal; 9. Kurangnya kesiapan masyarakat dalam menerima pengembangan kepariwisataan 10. Riset atau kajian tentang pariwisata dan ekonomi kreatif masih terbatas; 11. Ketersedian infrastruktur ekonomi kreatif masih sangat terbatas; 12. Penyelenggraan event budaya masih terbatas; 13. Pengelolaan dan penetapan objek diduga cagar budaya masih terbatas; 14. Pelindungan hak kekayaan intelektual baik bagi pelaku ekonomi kreatif dan budaya masih terbatas; 15. Kebijakan atau regulasi baik pariwisata, ekonomi jreatif dan kebudayaan masih terbatas;

Peluang (Opportunities)	Strategi S – O	Strategi W – O
1. Ditetapkannya Pangandaran sebagai KSPN, KPPN dan DPN; 2. Kabupaten Pangandaran ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Nasional Priangan Timur – Pangandaran. Sektor prioritas yang akan dikembangkan adalah pertanian, industri, perkebunan, pariwisata dan perikanan (RTRW Provinsi Jawa Barat); 3. Sejak tahun 2016 pangandaran sudah menjadi member INSTO; 4. Kabupaten Pangandaran yang termasuk dalam Konstelasi Great Bandung; 5. Adanya Reaktivasi Jalur Kereta Api Banjar-Pangandaran-Cijulang. Pengembangan Bandar Udara Nusawiru. Pengembangan Pelabuhan Bojong Salawe. Pembangunan Airstrip Pangandaran akan mendorong konektifitas antar destinasi wisata menuju dan di dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;	1. Pengembangan aksesibilitas jalur tepi pantai; 2. Pengembangan kuantitas dan peningkatan kualitas sarana dan parasarana pariwisata di daya tarik wisata; 3. Pemenuhan dan penerapan kriteria berkelanjutan sesuai dengan kriteria GSTC-D; 4. Peningkatan kualitas destinasi pariwisata dengan nilai keramah tamahan dan hospitality penduduk lokal;	1. Pengembangan potensi daya tarik wisata baik bahari, alam non bahari, budaya dan wisata minat khusus; 2. Penambahan dan pengembangan aksesibilitas menuju pangandaran dan daya tarik wisata; 3. Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan parasarana pendukung pariwisata; 4. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi; 5. Pengembangan strategi dan branding pemasaran pariwisata Pangandaran; 6. Pengembangan event wisata, event kreatif dan event budaya yang bersifat massive; 7. Peningkatan kerjasama antara stakeholder pariwisata; 8. Pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif (pembanguna creative center); 9. Peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif yang lebih profesional dan mandiri; 10. Pengembangan infrastruktur kebudayaan (pembangunan pusat budaya sebagai wadah dalam berkreasi dan berekspresi); 11. Penetapan dan pengelolaan objek diduga cagar budaya;
Ancaman (Threats)	Strategi S – T	Strategi W – T
1. Kondisi geografis Kabupaten Pangandaran secara alamiah berada pada daerah rawan bencana, baik bencana tsunami, pergerakan tanah dan juga banjir; 2. Ketatnya persaingan dengan destinasi pariwisata sejenis yang sedang dikembangkan daerah sekitar; 3. Kesiapan masyarakat, pelaku usaha	1. Pengembangan pariwisata yang tanggap bencana; 2. Pengembangan daya tarik wisata yang memperhatikan aspek kebersihan, kenyamanan dan keselamatan; 3. Pengembangan pariwisata yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan; 4. Perlindungan terhadap hak kekayaan budaya dan ekonomi kreatif;	1. Pengembangan “early warning system “ untuk bencana alam; 2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata; 3. Pengembangan daya tarik wisata alam non bahari, desa wisata dan wisata minat khusus; 4.

pariwista dan ekonomi kreatif di destinasi pariwisata dalam penerapan SOP new normal pandemic Covid-19; 4. Akuisisi warisan budaya benda dan tak benda oleh daerah sekitar karena persamaan warisan budaya;		
---	--	--

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memberikan pelayanannya adalah sebagai berikut :

1. Letak geografis Kabupaten Pangandaran yang memiliki garis pantai kurang lebih 91 KM dan sebaran daya tarik wisata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran menjadi potensi pengembangan pariwisata dengan daya tarik wisata yang variatif;
2. Menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang berskala internasional – sejajar dengan daerah tujuan wisata internasional lain di Indonesia;
3. Pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan dengan adanya dukungan dan kerjasama yang lebih baik tidak hanya dengan masyarakat pangandaran stakeholders pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran akan tetapi dengan pemerintah regional maupun nasional, maupun kerjasama dengan Kementrian dan perguruan tinggi – bahkan kerjasama dengan luar negeri;
4. Peningkatan infrastuktur pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan secara optimal, seperti peningkatan kondisi infrastruktur dasar yang belum baik, terutama jalan, yang menyebabkan aksesibilitas ke destinasi wisata dirasakan sulit serta menghambat konektivitas dan pengembangan pembangunan kepariwisataan secara inklusif;
5. Mengembangkan strategi komunikasi pemasaran yang terpadu dengan berkembangnya media promosi dan pemanfaatan teknologi informasi;
6. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran agar mampu berdaya saing, kompetitif dan profesional;
7. Mengembangkan program kemitraan dengan masyarakat lokal dalam industri pariwisata;
8. Merancang zonasi pengembangan kepariwisataan guna mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan;
9. Peningkatan perekonomian daerah yang inklusif melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan industri untuk mendorong aktivitas pariwisata dilakukan dengan meningkatkan kemitraan antara industri pariwisata dengan masyarakat lokal;
10. Mempersiapkan daya saing masyarakat guna menghadapi era globalisasi;
11. Mempertahankan nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Pangandaran akibat adanya kemudahan akses teknologi informasi, komunikasi dan modernisasi;
12. Kondisi geografis Kabupaten Pangandaran secara alamiah berada pada daerah rawan akan bencana;
13. Mengembangkan potensi Kabupaten Pangandaran yang memiliki daerah tujuan wisata (DTW) yang bervariasi, garis pantai yang panjang yang bisa melihat terbit dan tenggelamnya matahari dari tempat yang sama dan aktivitas Pariwisata tersebar merata di seluruh kecamatan;
14. Ketersediaan sumber daya alam yang berkualitas, beragam, dan kompetitif serta sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah;

15. Industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam;
16. Ketersediaan pembiayaan yang sesuai untuk industri kreatif, mudah diakses dan kompetitif serta perluasan pasar bagi karya kreatif;
17. Ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif untuk pengembangan kreatifitas;
18. Kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
19. Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya lokal baik benda dan tak benda.
20. Peningkatan apresiasi terhadap objek pemajuan kebudayaan yang ada seperti seni, tradisi, upacara adat dan lainnya serta kreatifitas Karya Budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Pangandaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

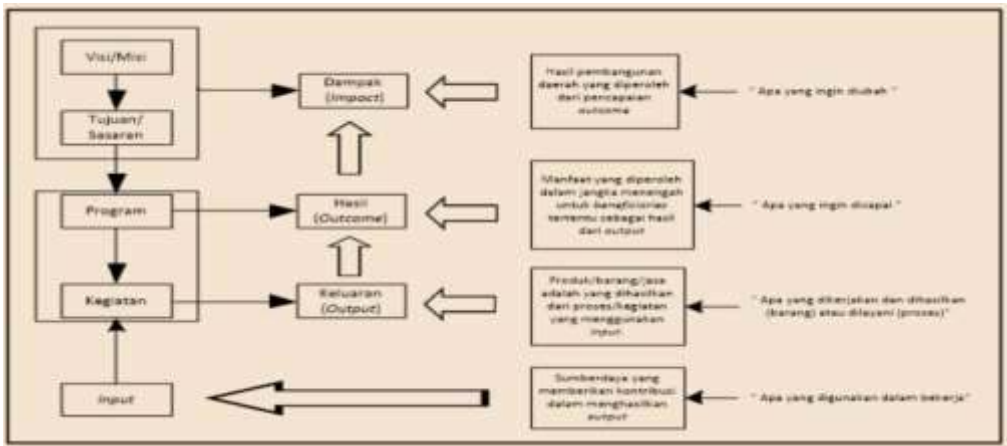
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran



4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

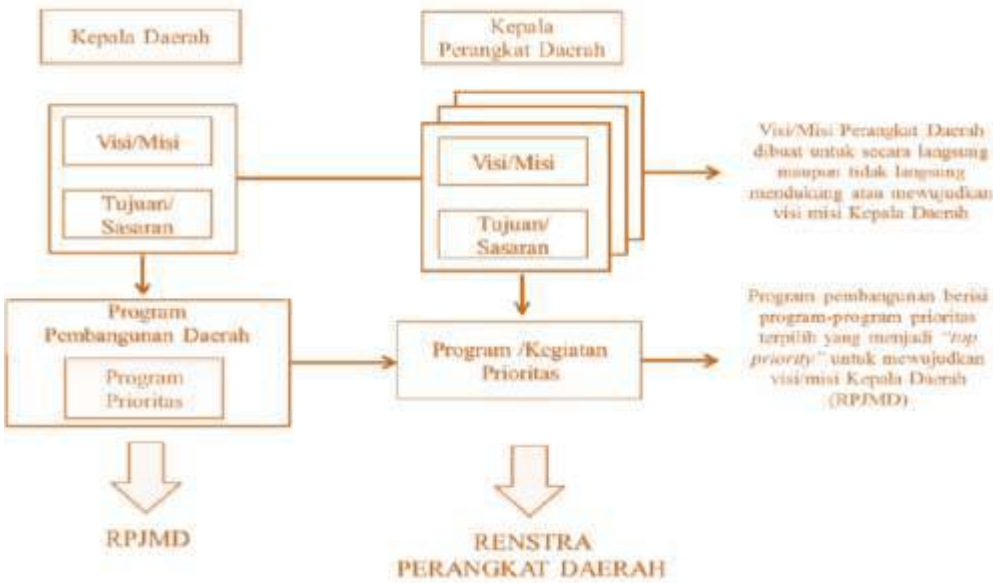
Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber :Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 4.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:



Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017

Gambar 4.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- 2) Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 4) Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 5) Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- 2) Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- 3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- 4) Memenuhi kriteria SMART-C.

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
- 2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
- 3) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
- 4) merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD periode RPJMD berkenaan; dan
- 5) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
MISI 2	Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan								
1	Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata		Rata-rata pengeluaran wisatawan	-	Rp 630.000	Rp 660.000	Rp 690.000	Rp 720.000	Rp 750.000
		Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	-	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	-	1,29 (Hari)	1,42 (Hari)	1,54 (Hari)	1,67 (Hari)	1,80 (Hari)
			Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	15%	20%	25%	30%	35%
			Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan	-	15%	20%	25%	30%	35%
MISI 5	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel								
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik (<i>good govermance</i>)		Nilai SAKIP	-	67,25-69,00	69,25-72,00	72,25-76,00	76,25-81,00	81,25-85,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan professional	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	85,54	67,25-69,00	69,25-72,00	72,25-76,00	76,25-81,00	81,25-85,00

Formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.2
Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
MISI 2	Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan				
1	Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata		Rata-rata pengeluaran wisatawan	Hasil Survey (Menggunakan Sampel): Jumlah Pengeluaran Wisatawan (Rp) ----- Jumlah Wisatawan (Orang)	Survey dilakukan setiap tahun, perhitungan sampel disesuaikan dengan jumlah kunjungan pada saat survey dilakukan dengan hasil akhir berupa nominal angka dalam satuan Rupiah
		Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan th. (n) - Jumlah kunjungan wisatawan th. (n-1) ----- x 100% Jumlah kunjungan wisatawan th. (n-1)	Jumlah kunjungan diambil dari daya tarik wisata atau destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hasil Survey (Menggunakan Sampel): Jumlah Waktu Kunjungan Wisatawan (Jam) ----- Jumlah Wisatawan (Orang)	Survey dilakukan setiap tahun, perhitungan sampel disesuaikan dengan jumlah kunjungan pada saat survey dilakukan dengan hasil akhir berupa angka dalam satuan Hari yang dikonversi dari jumlah jam
			Persentase pengembnagan kapasitas sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina ---- ----- x 100% Jumlah total SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihitung adalah seluruh SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan pembinaan, peningkatan kapasitas atau kompetensi

			Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan	Jumlah budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan -----x 100% Jumlah total budaya lokal benda dan tak benda	Jumlah budaya lokal benda dan tak benda yang dihitung adalah seluruh budaya lokal yang mendapatkan pembinaan, pengembangan ataupun pelestarian
MISI 5	Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel				
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik (<i>good govermance</i>)		Nilai SAKIP	Hasil Nilai SAKIP Tahun n-1	Hasil nilai yang diambil adalah penilaian SAKIP tahun n-1 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan professional	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	Hasil LHE AKIP Tahun n-1	Hasil nilai yang diambil adalah penilaian SAKIP tahun n-1 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan Strategi Dan Arah Kebijakan merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada.

Strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut ini :

Table 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Parwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran

VISI : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa			
MISI II : Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan akses dan kualitas destinasi pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, komprehensif dan terintegrasi	Pengembangan potensi destinasi pariwisata
			Pemenuhan kriteria berkelanjutan di destinasi pariwisata
			Optimalisasi pengelolaan destinasi pariwisata
			Penyusunan kebijakan dan riset pengembangan destinasi pariwisata
			Pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata
			Penyusunan kebijakan pengembangan industri pariwisata (13 Jenis Usaha Pariwisata)
			Penyusunan kejasama kelembagaan pariwisata

			Pemerataan penguatan organisasi pariwisata
		Mengembangkan Pemasaran Pariwisata dengan pemfaatan teknologi dan strategi kemitraan	Pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata
			Pengembangan media promosi pariwisata dengan pemanfaatan teknologi
			Penyusunan riset pengembangan pemasaran pariwisata
			Penguatan data dan informasi pariwisata
		Mengembangkan Infrastruktur Ekonomi Kreatif dan Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif
			Penyusunan Riset pengembangan ekonomi kreatif
			Penyusunan kejasama kelembagaan pariwisata
			Pengembangan pemasaran produk ekonomi kreatif
			Fasilitasi Hak kekayaan intelektual
			Peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif
			Penguatan data dan informasi ekonomi kreatif
			Peningkatan kapasitas SDM pariwisata yang berkompeten, berdaya saing dan bersertifikat
			Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang berkompeten dan berdaya saing
		Peningkatan perlindungan dan keberlanjutan kebudayaan lokal	Pengembangan dan pemajuan kebudayaan lokal dengan inovasi, kolaborasi dan pengolahan produk
			Perlindungan kebudyaaan lokal (hak kekayaan intelektual dan penetapan objek diduga cagar budaya)
			Pelestarian Kebudayaan Lokal
			Pemanfaatan Kebudayaan Lokal

			Penyusunan kebijakan pengembangan kebudayaan lokal
MISI V : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel			
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik (<i>good govermance</i>)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan professional	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang professional	Peningkatan pelayanan publik yang prima, baik dan bersih

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Table 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Kondi si Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
Dinas Pariwisata dan Kebudaya an							39.44 5.553. 226		40.35 4.352. 905		41.323. 674.995		42.35 9.268. 162		43.467.45 2.903		43.467. 452.903		
Peningkata n akses dan daya tarik destinasi pariwisata				Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan			39.445 .553.2 26		40.354 .352.9 05		41.323.6 74.995		42.359 .268.1 62		43.467.45 2.903			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kabupate n Pangand aran
	Meningk atnya Pengemb angan Pariwisat a dan Kebuday aan Lokal			Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	N/A		-		-		-		-		-				
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	N/A	10,00 %	18.230 .660.0 00	12,00 %	20.060 .525.6 00	14,00 %	18.552.9 78.000	16,00 %	18.737 .607.5 00	18,00 %	18.924.28 7.000	18,00 %	18.924.2 87.000		
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	N/A	10,00 %	2.120. 500.00 0	12,00 %	2.220. 955.00 0	14,00 %	2.504.23 4.500	16,00 %	2.528. 377.00 0	18,00 %	2.552.963. 500	18,00 %	2.552.96 3.500		
			Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	N/A	1 Lokasi	25.000 .000	2 Lokasi	50.500 .000	2 Lokasi	51.005.0 00	2 Lokasi	51.515 .000	2 Lokasi	52.030.00 0	2 Lokasi	52.030.0 00		

			Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	104.500.000	3 Dokumen	459.045.000	3 Dokumen	463.635.500	3 Dokumen	468.272.000	3 Dokumen	468.272.000		
			Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	N/A	5 Lokasi	1.985.500.000	5 Lokasi	2.005.355.000	5 Lokasi	1.842.978.500	5 Lokasi	1.861.408.500	5 Lokasi	1.880.225.000	5 Lokasi	1.880.225.000		
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.600.000	1 Dokumen	151.206.000	1 Dokumen	151.818.000	1 Dokumen	152.436.500	1 Dokumen	152.436.500		
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	N/A	10,00 %	2.130.600.000	12,00 %	1.312.715.000	14,00 %	1.327.785.000	16,00 %	1.341.063.000	18,00 %	1.354.474.000	18,00 %	1.354.474.000		
			Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	%	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	755.000.000	1 Dokumen	762.550.000	1 Dokumen	770.175.500	1 Dokumen	777.877.500	1 Dokumen	777.877.500		

			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	N/A	5 Unit	500.00 0.000	2 Unit	305.00 0.000	3 Unit	310.000. 000	5 Unit	313.10 0.000	5 Unit	316.231.0 00	5 Unit	316.231. 000		
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	N/A	1 Doku men	30.600 .000	1 Doku men	52.015 .000	1 Doku men	52.535.0 00	1 Doku men	53.060 .500	1 Doku men	53.591.00 0	1 Doku men	53.591.0 00		
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	N/A	1 Lokasi	1.000. 000.00 0	1 Lokasi	200.70 0.000	1 Lokasi	202.700. 000	1 Lokasi	204.72 7.000	1 Lokasi	206.774.5 00	1 Lokasi	206.774. 500		
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola	N/A	10,00 %	13.479 .560.0 00	12,00 %	16.072 .355.6 00	14,00 %	14.261.9 13.500	16,00 %	14.404 .532.0 00	18,00 %	14.548.57 8.000	18,00 %	14.548.5 78.000		
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	N/A	5 Doku men	1.850. 000.00 0	6 Doku men	6.096. 500.00 0	5 Doku men	4.596.50 0.000	5 Doku men	4.642. 465.00 0	5 Doku men	4.688.889. 500	5 Doku men	4.688.88 9.500		

			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	N/A	5 Lokasi	8.494.560.000	5 Lokasi	7.789.505.600	5 Lokasi	6.867.400.000	5 Lokasi	6.936.074.000	5 Lokasi	7.005.435.000	5 Lokasi	7.005.435.000		
			Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	N/A	3 Unit	1.475.000.000	3 Unit	1.489.750.000	5 Unit	2.004.647.500	5 Unit	2.024.694.000	5 Unit	2.044.941.000	5 Unit	2.044.941.000		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	N/A	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	404.000.000	1 Laporan	408.040.000	1 Laporan	412.120.000	1 Laporan	416.241.500	1 Laporan	416.241.500		
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	N/A	1 Lokasi	1.260.000.000	1 Lokasi	292.600.000	1 Lokasi	385.326.000	1 Lokasi	389.179.000	1 Lokasi	393.071.000	1 Lokasi	393.071.000		
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	N/A	10,00 %	500.000.000	12,00 %	454.500.000	50,00 %	459.045.000	50,00 %	463.635.500	50,00 %	468.271.500	50,00 %	468.271.500		
			Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	N/A	50 Dokumen	75.000.000	50 Dokumen	75.750.000	50 Dokumen	76.507.500	50 Dokumen	77.272.500	50 Dokumen	78.045.000	50 Dokumen	78.045.000		

			Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	N/A	2 Laporan	375.000.000	2 Laporan	328.250.000	2 Laporan	331.532.500	2 Laporan	334.848.000	2 Laporan	338.196.500	2 Laporan	338.196.500		
			Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	N/A	2 Unit Usaha	50.000.000	2 Unit Usaha	50.500.000	2 Unit Usaha	51.005.000	2 Unit Usaha	51.515.000	2 Unit Usaha	52.030.000	2 Unit Usaha	52.030.000		
				Rata-rata lama tinggal wisatawan	N/A														
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	N/A	25,00 %	3.669.000.000	30,00 %	3.661.250.000	35,00 %	3.697.862.500	40,00 %	3.734.830.500	45,00 %	3.777.384.500	45,00 %	3.777.384.500		
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan	N/A	25,00 %	3.669.000.000	30,00 %	3.661.250.000	35,00 %	3.697.862.500	40,00 %	3.734.830.500	45,00 %	3.777.384.500	45,00 %	3.777.384.500		
			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	N/A	1 Dokumen	875.000.000	1 Dokumen	883.750.000	1 Dokumen	1.392.587.500	1 Dokumen	1.406.513.500	1 Dokumen	1.425.785.000	1 Dokumen	1.425.785.000		
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	N/A	1 Laporan	1.994.000.000	1 Laporan	1.969.500.000	1 Laporan	1.489.195.000	1 Laporan	1.504.087.000	1 Laporan	1.519.128.000	1 Laporan	1.519.128.000		

			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	N/A	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	151.500.000	1 Dokumen	153.015.000	1 Dokumen	154.545.000	1 Dokumen	156.090.000	1 Dokumen	156.090.000		
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	N/A	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	101.000.000	2 Dokumen	102.010.000	2 Dokumen	103.030.000	2 Dokumen	104.060.000	2 Dokumen	104.060.000		
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	N/A	5 Dokumen	550.000.000	5 Dokumen	555.500.000	5 Dokumen	561.055.000	5 Dokumen	566.655.000	5 Dokumen	572.321.500	5 Dokumen	572.321.500		
				Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	N/A														
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	N/A	10,00 %	1.255.000.000	12,00 %	760.200.000	14,00 %	1.415.552.000	16,00 %	1.465.056.500	18,00 %	1.479.705.000	18,00 %	1.479.705.000		
			Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prasarana kreatif yang dibangun	N/A	10,00 %	550.000.000	12,00 %	205.500.000	14,00 %	526.055.000	16,00 %	566.665.500	18,00 %	572.332.000	18,00 %	572.332.000		
			Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	N/A	1 Unit	550.000.000	1 Unit	205.500.000	1 Unit	526.055.000	1 Unit	566.665.500	1 Unit	572.332.000	1 Unit	572.332.000		

			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	N/A	10,00 %	705.00 0.000	12,00 %	554.70 0.000	14,00 %	889.497. 000	16,00 %	898.39 1.000	18,00 %	907.373.0 00	18,00 %	907.373. 000		
			Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	N/A	1 Doku men	25.000 .000	1 Doku men	61.000 .000	1 Doku men	102.010. 000	1 Doku men	103.03 0.000	1 Doku men	104.060.0 00	1 Doku men	104.060. 000		
			Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	N/A	1 Lapora n	200.00 0.000	1 Lapora n	202.00 0.000	1 Lapora n	204.020. 000	1 Lapora n	206.06 0.000	1 Lapora n	208.120.0 00	1 Lapora n	208.120. 000		
			Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	N/A	1 Unit	35.000 .000	1 Unit	67.000 .000	2 Unit	204.020. 000	2 Unit	206.06 0.000	2 Unit	208.120.0 00	2 Unit	208.120. 000		
			Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	N/A	3 Doku men	370.00 0.000	1 Doku men	123.70 0.000	2 Doku men	277.437. 000	2 Doku men	280.21 1.000	3 Doku men	283.013.0 00	3 Doku men	283.013. 000		
			Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	N/A	1 Doku men	25.000 .000	2 Doku men	50.500 .000	2 Doku men	51.005.0 00	2 Doku men	51.515 .000	2 Doku men	52.030.00 0	2 Doku men	52.030.0 00		
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	N/A	1 Doku men	50.000 .000	1 Doku men	50.500 .000	1 Doku men	51.005.0 00	1 Doku men	51.515 .000	1 Doku men	52.030.00 0	1 Doku men	52.030.0 00		
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	N/A	15,00 %	1.205. 000.00 0	20,00 %	1.096. 350.00 0	25,00 %	1.157.81 3.500	30,00 %	1.169. 390.50 0	35,00 %	1.181.084. 000	35,00 %	1.181.08 4.000		

			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar	N/A	15%	1.050.000.000	20%	909.000.000	25%	918.090.000	30%	927.270.500	35%	936.542.500	35%	936.542.500		
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	N/A	160 Orang	300.000.000	160 Orang	303.000.000	160 Orang	306.030.000	160 Orang	309.090.000	160 Orang	312.181.000	160 Orang	312.181.000		
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	N/A	40 Orang	150.000.000	40 Orang	151.500.000	40 Orang	153.015.000	40 Orang	154.545.500	40 Orang	156.090.000	40 Orang	156.090.000		
			Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	N/A	300 Orang	450.000.000	200 Orang	303.000.000	200 Orang	306.030.000	200 Orang	309.090.000	200 Orang	312.181.000	200 Orang	312.181.000		
			Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	N/A	25 Orang	100.000.000	25 Orang	101.000.000	25 Orang	102.010.000	25 Orang	103.030.000	25 Orang	104.060.500	25 Orang	104.060.500		
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.500.000	1 Dokumen	51.005.000	1 Dokumen	51.515.000	1 Dokumen	52.030.000	1 Dokumen	52.030.000		

			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	N/A	15%	155.00 0.000	20%	187.35 0.000	25%	239.723. 500	30%	242.12 0.000	35%	244.541.5 00	35%	244.541. 500		
			Pelatihan, Bimbingan teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	N/A	15 Orang	135.00 0.000	15 Orang	136.35 0.000	15 Orang	137.713. 500	15 Orang	139.09 0.000	15 Orang	140.481.5 00	15 Orang	140.481. 500		
			Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	N/A	5 Orang	20.000 .000	15 Orang	51.000 .000	25 Orang	102.010. 000	25 Orang	103.03 0.000	25 Orang	104.060.0 00	25 Orang	104.060. 000		
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	N/A	12%	2.315. 000.00 0	14%	2.139. 100.00 0	16%	2.458.44 1.000	18%	2.483. 024.00 0	20%	2.507.286. 000	20%	2.507.28 6.000		
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola	N/A	12%	1.625. 000.00 0	14%	1.642. 200.00 0	16%	1.754.57 2.000	18%	1.772. 117.00 0	20%	1.789.839. 000	20%	1.789.83 9.000		
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	N/A	1 Objek	1.575. 000.00 0	1 Objek	1.590. 750.00 0	1 Objek	1.606.65 7.500	1 Objek	1.622. 724.00 0	1 Objek	1.638.951. 500	1 Objek	1.638.95 1.500		
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	N/A	60 Orang	50.000 .000	20 Orang	51.450 .000	60 Orang	147.914. 500	60 Orang	149.39 3.000	60 Orang	150.887.5 00	60 Orang	150.887. 500		
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan	N/A	12%	240.00 0.000	14%	242.40 0.000	16%	244.824. 000	18%	247.27 2.000	20%	249.175.0 00	20%	249.175. 000		

			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	N/A	1 Objek	190.000.000	1 Objek	191.900.000	1 Objek	193.819.000	1 Objek	195.757.000	1 Objek	197.145.000	1 Objek	197.145.000		
			Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	N/A	2 Sertifikat	50.000.000	2 Sertifikat	50.500.000	2 Sertifikat	51.005.000	2 Sertifikat	51.515.000	2 Sertifikat	52.030.000	2 Sertifikat	52.030.000		
			Pembinaan Lembaga Adat yang Pengikutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang dibina	N/A	12%	450.000.000	14%	254.500.000	16%	459.045.000	18%	463.635.000	20%	468.272.000	20%	468.272.000		
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	N/A	2 Objek	250.000.000	2 Objek	152.500.000	2 Objek	255.025.000	2 Objek	257.575.000	2 Objek	260.151.000	2 Objek	260.151.000		
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	N/A	100 Orang	200.000.000	50 Orang	102.000.000	100 Orang	204.020.000	100 Orang	206.060.000	100 Orang	208.121.000	100 Orang	208.121.000		
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	N/A	12%	250.000.000	14%	202.500.000	16%	255.025.000	18%	257.575.000	20%	260.151.000	20%	260.151.000		
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan kesenian masyarakat lokal yang dilakukan	N/A	12%	250.000.000	14%	202.500.000	16%	255.025.000	18%	257.575.000	20%	260.151.000	20%	260.151.000		

			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	N/A	50 Orang	100.00 0.000	25 Orang	51.000 .000	50 Orang	102.010. 000	50 Orang	103.03 0.000	50 Orang	104.060.5 00	50 Orang	104.060. 500		
			Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	N/A	25 Sertifikat	100.00 0.000	25 Sertifikat	101.00 0.000	25 Sertifikat	102.010. 000	25 Sertifikat	103.03 0.000	25 Sertifikat	104.060.5 00	25 Sertifikat	104.060. 500		
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	2 Lembaga	50.000 .000	2 Lembaga	50.500 .000	2 Lembaga	51.005.0 00	2 Lembaga	51.515 .000	2 Lembaga	52.030.00 0	2 Lembaga	52.030.0 00		
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sejarah yang dilakukan	N/A	12%	25.000 .000	14%	51.000 .000	16%	102.010. 000	18%	103.03 0.000	20%	104.060.0 00	20%	104.060. 000		
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan sejarah lokal yang dilakukan	N/A	12%	25.000 .000	14%	51.000 .000	16%	102.010. 000	18%	103.03 0.000	20%	104.060.0 00	20%	104.060. 000		
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	N/A	15 Orang	25.000 .000	25 Orang	51.000 .000	50 Orang	102.010. 000	50 Orang	103.03 0.000	50 Orang	104.060.0 00	50 Orang	104.060. 000		
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	N/A	5%	345.00 0.000	7%	348.45 0.000	9%	351.934. 500	11%	355.45 3.620	13%	359.008.4 02	13%	359.008. 402		
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	N/A	5%	225.00 0.000	7%	227.25 0.000	9%	229.522. 500	11%	231.81 7.500	13%	234.135.9 02	13%	234.135. 902		
			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	N/A	5 Objek	95.000 .000	5 Objek	95.950 .000	5 Objek	96.909.5 00	5 Objek	97.878 .500	5 Objek	98.857.38 1	5 Objek	98.857.3 81		

			Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	N/A	3 Objek	130.00 0.000	3 Objek	131.30 0.000	3 Objek	132.613. 000	3 Objek	133.93 9.000	3 Objek	135.278.5 21	3 Objek	135.278. 521		
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	N/A	5%	120.00 0.000	7%	121.20 0.000	9%	122.412. 000	11%	123.63 6.120	13%	124.872.5 00	13%	124.872. 500		
			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	N/A	3 Objek	120.00 0.000	3 Objek	121.20 0.000	3 Objek	122.412. 000	3 Objek	123.63 5.000	3 Objek	124.872.5 00	3 Objek	124.872. 500		
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)				Nilai SAKIP															
	Meningkatkannya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan profesional			Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		90%	12.150 .893.2 26	90%	12.034 .977.3 05	90%	13.332.0 58.495	90%	14.053 .300.5 42	90%	14.874.48 7.001	90%	14.874.4 87.001		
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		90%		90%		90%		90%		90%		90%			
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur		90%		90%		90%		90%		90%		90%			
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		90%		90%		90%		90%		90%		90%			

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu		90%	120.00 0.000	90%	121.20 0.000	90%	122.407. 000	90%	123.63 6.500	90%	124.872.0 00	90%	124.872. 000		
				Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu		90%		90%		90%		90%		90%		90%			
				Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		90%		90%		90%		90%		90%		90%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10 Doku men	70.000 .000	10 Doku men	70.700 .000	10 Doku men	71.407.0 00	10 Doku men	72.121 .000	10 Doku men	72.842.00 0	10 Doku men	72.842.0 00		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Doku men	2.500. 000	1 Doku men	2.525. 000	1 Doku men	2.550.00 0	1 Doku men	2.576. 000	1 Doku men	2.601.500	1 Doku men	2.601.50 0		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Doku men	2.500. 000	1 Doku men	2.525. 000	1 Doku men	2.550.00 0	1 Doku men	2.576. 000	1 Doku men	2.601.500	1 Doku men	2.601.50 0		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Doku men	2.500. 000	1 Doku men	2.525. 000	1 Doku men	2.550.00 0	1 Doku men	2.576. 000	1 Doku men	2.601.500	1 Doku men	2.601.50 0		

			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Doku men	2.500. 000	1 Doku men	2.525. 000	1 Doku men	2.550.00 0	1 Doku men	2.576. 000	1 Doku men	2.601.500	1 Doku men	2.601.50 0		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		16 Lapora n	35.000 .000	16 Lapora n	35.350 .000	16 Lapora n	35.700.0 00	16 Lapora n	36.060 .000	16 Lapora n	36.421.00 0	16 Lapora n	36.421.0 00		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Lapora n	5.000. 000	3 Lapora n	5.050. 000	3 Lapora n	5.100.00 0	3 Lapora n	5.151. 500	3 Lapora n	5.203.000	3 Lapora n	5.203.00 0		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik		90%	6.252. 334.22 6	90%	6.392. 983.45 7	90%	7.022.71 2.495	90%	7.715. 370.54 2	90%	8.477.354. 501	90%	8.477.35 4.501		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		43 Orang /bulan	6.146. 834.22 6	43 Orang /bulan	6.286. 428.45 7	43 Orang /bulan	6.915.09 3.245	43 Orang /bulan	7.606. 674.04 2	43 Orang /bulan	8.367.571. 001	43 Orang /bulan	8.367.57 1.001		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Doku men	2.500. 000	1 Doku men	2.525. 000	1 Doku men	2.550.25 0	1 Doku men	2.575. 500	1 Doku men	2.601.500	1 Doku men	2.601.50 0		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2 Doku men	30.000 .000	2 Doku men	30.300 .000	2 Doku men	30.603.0 00	2 Doku men	30.909 .000	2 Doku men	31.218.00 0	2 Doku men	31.218.0 00		

			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		2 Doku men	30.000 .000	2 Doku men	30.300 .000	2 Doku men	30.603.0 00	2 Doku men	30.909 .000	2 Doku men	31.218.00 0	2 Doku men	31.218.0 00		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Lapora n	5.000. 000	1 Lapora n	30.300 .000	1 Lapora n	30.603.0 00	1 Lapora n	30.909 .000	1 Lapora n	31.218.00 0	1 Lapora n	31.218.0 00		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		3 Doku men	30.000 .000	1 Doku men	5.050. 000	1 Doku men	5.100.00 0	1 Doku men	5.151. 500	1 Doku men	5.203.000	1 Doku men	5.203.00 0		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		1 Lapora n	5.000. 000	1 Lapora n	5.050. 000	1 Lapora n	5.100.00 0	1 Lapora n	5.151. 500	1 Lapora n	5.203.000	1 Lapora n	5.203.00 0		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Doku men	3.000. 000	1 Doku men	3.030. 000	1 Doku men	3.060.00 0	1 Doku men	3.091. 000	1 Doku men	3.122.000	1 Doku men	3.122.00 0		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik		30 Jenis dan 900 Unit/B uah	85.000 .000	25 Jenis dan 900 Unit/B uah	85.850 .000	25 Jenis dan 900 Unit/B uah	86.706.0 00	25 Jenis dan 900 Unit/B uah	87.575 .500	25 Jenis dan 900 Unit/B uah	88.451.00 0	25 Jenis dan 900 Unit/B uah	88.451.0 00		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Doku men	5.000. 000	1 Doku men	5.050. 000	1 Doku men	5.100.00 0	1 Doku men	5.151. 500	1 Doku men	5.203.000	1 Doku men	5.203.00 0		

			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.050.000	1 Dokumen	5.100.000	1 Dokumen	5.151.500	1 Dokumen	5.203.000	1 Dokumen	5.203.000		
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.050.000	1 Laporan	5.100.000	1 Laporan	5.151.500	1 Laporan	5.203.000	1 Laporan	5.203.000		
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.050.000	1 Laporan	5.100.000	1 Laporan	5.151.500	1 Laporan	5.203.000	1 Laporan	5.203.000		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.300.000	12 Laporan	30.603.000	12 Laporan	30.909.000	12 Laporan	31.218.000	12 Laporan	31.218.000		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.300.000	1 Laporan	30.603.000	1 Laporan	30.909.000	1 Laporan	31.218.000	1 Laporan	31.218.000		
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.050.000	1 Dokumen	5.100.000	1 Dokumen	5.151.500	1 Dokumen	5.203.000	1 Dokumen	5.203.000		
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah		10%	105.000.000	15%	106.050.000	20%	257.106.000	25%	228.181.500	30%	189.263.000	30%	189.263.000		
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.150.000	1 Dokumen	65.300.000	1 Dokumen	35.454.500	1 Dokumen	35.609.000	1 Dokumen	35.609.000		

			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.150.000	1 Dokumen	115.300.000	1 Dokumen	75.454.500	1 Dokumen	35.609.000	1 Dokumen	35.609.000		
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.150.000	1 Laporan	15.300.000	1 Laporan	55.454.500	1 Laporan	55.609.000	1 Laporan	55.609.000		
			Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.300.000	2 Laporan	30.603.000	2 Laporan	30.909.000	2 Laporan	31.218.000	2 Laporan	31.218.000		
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.300.000	1 Dokumen	30.603.000	1 Dokumen	30.909.000	1 Dokumen	31.218.000	1 Dokumen	31.218.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik		90%	491.500.000	90%	440.865.000	90%	620.272.000	90%	625.725.500	90%	631.771.500	90%	591.771.500		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		5 Unit	70.000.000	5 Unit	45.450.000	5 Unit	45.904.500	5 Unit	46.363.500	5 Unit	46.827.000	5 Unit	46.827.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	15.000.000	1 Paket	25.250.000	1 Paket	65.502.500	1 Paket	65.757.500	1 Paket	66.015.000	1 Paket	66.015.000		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	54.540.000	1 Dokumen	55.085.000	1 Dokumen	55.636.500	1 Dokumen	56.192.500	1 Dokumen	56.192.500		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	27.775.000	1 Dokumen	28.052.000	1 Dokumen	28.333.000	1 Dokumen	28.616.500	1 Dokumen	28.616.500		

			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Doku men	5.000.000	1 Doku men	5.050.000	1 Doku men	105.100.000	1 Doku men	106.151.000	1 Doku men	107.212.500	1 Doku men	107.212.500		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		220 Orang	280.000.000	50 Orang	90.900.000	50 Orang	111.809.000	50 Orang	112.727.000	50 Orang	113.654.000	50 Orang	113.654.000		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		40 Orang	20.000.000	200 Orang	90.900.000	200 Orang	106.809.000	200 Orang	107.727.000	200 Orang	108.654.000	200 Orang	108.654.000		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 Orang	20.000.000	50 Orang	101.000.000	50 Orang	102.010.000	50 Orang	103.030.000	50 Orang	104.600.000	50 Orang	104.600.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik		90%	990.059.000	90%	1.192.958.848	90%	1.228.306.500	90%	1.242.167.000	90%	1.256.614.000	90%	1.256.614.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.150.000	1 Paket	15.300.000	1 Paket	15.454.500	1 Paket	15.609.000	1 Paket	15.609.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	434.309.000	2 Paket	438.651.348	2 Paket	443.038.000	2 Paket	447.468.000	2 Paket	451.943.000	2 Paket	451.943.000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.250.000	1 Paket	25.500.000	1 Paket	25.757.500	1 Paket	26.015.000	1 Paket	26.015.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	11.750.000	1 Paket	11.867.500	1 Paket	10.339.000	1 Paket	12.016.000	1 Paket	12.227.000	1 Paket	12.227.000		

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	25.000.000	2 Paket	253.250.000	2 Paket	275.502.500	2 Paket	278.257.500	2 Paket	282.431.500	2 Paket	282.431.500		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		27 Dokumen	40.000.000	27 Dokumen	40.400.000	27 Dokumen	40.804.000	27 Dokumen	41.212.000	27 Dokumen	41.624.000	27 Dokumen	41.624.000		
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.050.000	1 Paket	5.100.000	1 Paket	5.151.500	1 Paket	5.203.000	1 Paket	5.203.000		
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		25 Laporan	75.000.000	25 Laporan	75.750.000	25 Laporan	76.507.500	25 Laporan	77.272.500	25 Laporan	78.045.000	25 Laporan	78.045.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150 Laporan	300.000.000	150 Laporan	303.000.000	150 Laporan	306.030.000	150 Laporan	309.090.000	150 Laporan	312.181.000	150 Laporan	312.181.000		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.050.000	2 Dokumen	5.100.000	2 Dokumen	5.151.500	2 Dokumen	5.203.000	2 Dokumen	5.203.000		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	19.540.000	1 Dokumen	25.085.500	2 Dokumen	25.336.000	2 Dokumen	26.132.500	2 Dokumen	26.132.500		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi		90%	2.710.000.000	90%	2.284.100.000	90%	2.549.471.000	90%	2.571.114.500	90%	2.632.036.000	90%	2.672.036.000		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		5 Unit	580.000.000	5 Unit	562.800.000	5 Unit	591.658.000	5 Unit	597.574.500	5 Unit	603.550.000	5 Unit	603.550.000		

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 Unit	660.00 0.000	3 Unit	636.60 0.000	3 Unit	673.266. 000	3 Unit	679.99 8.500	3 Unit	686.798.5 00	3 Unit	686.798. 500		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	100.00 0.000	3 Unit	101.00 0.000	3 Unit	102.010. 000	3 Unit	103.03 0.000	3 Unit	104.060.0 00	3 Unit	104.060. 000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	120.00 0.000	10 Unit	121.20 0.000	10 Unit	122.412. 000	10 Unit	123.63 6.000	10 Unit	124.872.5 00	10 Unit	124.872. 500		
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		2 Unit	250.00 0.000	2 Unit	252.50 0.000	2 Unit	255.025. 000	2 Unit	257.57 5.500	2 Unit	260.151.0 00	2 Unit	260.151. 000		
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		2 Unit	100.00 0.000	2 Unit	101.00 0.000	2 Unit	102.010. 000	2 Unit	103.03 0.000	2 Unit	104.060.0 00	2 Unit	104.060. 000		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	700.00 0.000	1 Unit	307.00 0.000	1 Unit	499.070. 000	1 Unit	500.21 0.000	1 Unit	540.423.0 00	1 Unit	540.423. 000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		20 Unit	200.00 0.000	20 Unit	202.00 0.000	20 Unit	204.020. 000	20 Unit	206.06 0.000	20 Unit	208.121.0 00	20 Unit	208.121. 000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		90%	802.00 0.000	90%	810.02 0.000	90%	838.120. 000	90%	846.50 1.000	90%	854.966.0 00	90%	854.966. 000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Lapora n	37.000 .000	2 Lapora n	37.370 .000	2 Lapora n	37.743.5 00	2 Lapora n	38.121 .000	2 Lapora n	38.502.00 0	2 Lapora n	38.502.0 00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Lapora n	324.00 0.000	3 Lapora n	327.24 0.000	3 Lapora n	350.512. 500	3 Lapora n	354.01 7.500	3 Lapora n	357.558.0 00	3 Lapora n	357.558. 000		

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.300.000	2 Laporan	30.603.000	2 Laporan	30.909.000	2 Laporan	31.218.000	2 Laporan	31.218.000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 Laporan	411.000.000	5 Laporan	415.110.000	5 Laporan	419.261.000	5 Laporan	423.453.500	5 Laporan	427.688.000	5 Laporan	427.688.000		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi		90%	595.000.000	90%	600.950.000	90%	606.957.500	90%	613.028.500	90%	619.159.000	90%	619.159.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		11 Unit	250.000.000	11 Unit	252.500.000	11 Unit	255.025.000	11 Unit	257.575.000	11 Unit	260.151.000	11 Unit	260.151.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	100.000.000	4 Unit	101.000.000	4 Unit	102.010.000	4 Unit	103.030.000	4 Unit	104.060.000	4 Unit	104.060.000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		13 Unit	25.000.000	13 Unit	25.250.000	13 Unit	25.502.500	13 Unit	25.757.500	13 Unit	26.015.000	13 Unit	26.015.000		
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		3 Unit	5.000.000	3 Unit	5.050.000	3 Unit	5.100.000	3 Unit	5.151.500	3 Unit	5.203.000	3 Unit	5.203.000		
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.150.000	1 Unit	15.300.000	1 Unit	15.454.500	1 Unit	15.609.000	1 Unit	15.609.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	200.000.000	2 Unit	202.000.000	2 Unit	204.020.000	2 Unit	206.060.000	2 Unit	208.121.000	2 Unit	208.121.000		

Formulasi perhitungan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Table 6.2
Formulasi Perhitungan Indikator Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Parwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran

Nomor	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata			Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	Hasil Survey (Menggunakan Sampel) : Jumlah Pengeluaran Wisatawan (Rp) Jumlah Wisatawan (Orang)	Survey Lapangan dan Data Sekunder	
		Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan th.(n) - Jumlah kunjungan wisatawan th.(n-1)}}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan th. (n-1)}} \times 100\%$	Survey Lapangan dan Data Sekunder	
1			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	$\frac{\text{Jumlah Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Total Daya Tarik Destinasi Pariwisata}} \times 100\%$	Laporan pengembangan daya tarik destinasi pariwisata	
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	%	$\frac{\text{Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola}}{\text{Jumlah Total Daya Tarik Wisata}} \times 100\%$	Laporan pengelolaan daya tarik wisata	
			Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata yang Ditetapkan Pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata yang Disusun Pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	

			Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan Pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata yang Disusun Pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	%	$\frac{\text{Jumlah Daya Kawasan Strategis Pariwisata yang Dikelola}}{\text{Jumlah Total Kawasan Strategis Pariwisata}} \times 100\%$	Laporan pengelolaan kawasan strategis pariwisata	
			Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata yang Disusun Pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata yang Disusun Pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola	%	$\frac{\text{Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola}}{\text{Jumlah total Destinasi Pariwisata}} \times 100\%$	Laporan pengelolaan destinasi pariwisata	

			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang Tersedia dan Terpelihara pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang Disusun pada tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	%	$\frac{\text{Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang Ditetapkan}}{\text{Jumlah Total Usaha Pariwisata yang Mendaftar}} \times 100\%$	Laporan Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP	
			Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	

				Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	$\frac{\text{Hasil Survey (Menggunakan Sampel): Jumlah Waktu Kunjungan Wisatawan (Jam)}}{\text{Jumlah Wisatawan (Orang)}} \times 100\%$	Survey Lapangan dan Data Sekunder	
2			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	%	$\frac{\text{Jumlah Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Dipasarkan}}{\text{Jumlah Total Daya Tarik Wisata Destinasi Pariwisata}} \times 100\%$	Laporan Data Media Promosi	
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan	%	$\frac{\text{Jumlah Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata yang Dipasarkan dan Dipromosikan}}{\text{Jumlah Total Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata}} \times 100\%$	Laporan Data Media Promosi	
			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	

			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
				Persentase Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	$\frac{\text{Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina}}{\text{Jumlah total SDM pariwisata dan ekonomi kreatif}} \times 100\%$	Survey Lapangan dan Data Sekunder	
3			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	%	$\frac{\text{Jumlah Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan Dilindungi}}{\text{Jumlah Total Subsektor Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$	Laporan Data Ekonomi Kreatif	
			Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prasarana kreatif yang dibangun	%	$\frac{\text{Jumlah Prasarana kreatif yang Dibangun}}{\text{Jumlah Prasarana Kreatif yang Diajukan di RKBU}} \times 100\%$	Laporan Data Ekonomi Kreatif	
			Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	$\frac{\text{Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Total Ekosistem Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$	Laporan Data Ekonomi Kreatif	
			Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan/Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	

			Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Disusunn pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
4			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	%	$\frac{\text{Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas/Pelatihan/Pembinaan}}{\text{Jumlah Total Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$	Laporan Peningkatan Kapasitas/Pelatihan/Pembi naan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kratif	
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar	%	$\frac{\text{Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Tingkat dasar}}{\text{Jumlah Total Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$	Laporan Peningkatan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kratif	
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	

			Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas}}{\text{Jumlah Total Pelaku Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$	Laporan Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
			Pelatihan, Bimbingan teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
5			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	%	$\frac{\text{Jumlah Kebudayaan Lokal yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Total Kebudayaan Lokal}} \times 100\%$	Laporan Pengembangan Kebudayaan	
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola	%	$\frac{\text{Jumlah Kebudayaan lokal yang Masyarakat Pelakunya yang Dikelola}}{\text{Jumlah Total Kebudayaan Lokal yang Masyarakat Pelakunya}} \times 100\%$	Laporan Pengelolaan Kebudayaan Lokal	

			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan	%	$\frac{\text{Jumlah Kesenian Tradisional Masyarakat Lokal yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Total Kesenian Tradisional Masyarakat Lokal}} \times 100\%$	Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional Lokal	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang dibina	%	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Adat yang Dibina}}{\text{Jumlah Total Lembaga Adat}} \times 100\%$	Laporan Pembinaan Lembaga Adat	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
6			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	$\frac{\text{Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina}}{\text{Jumlah Total Kesenian Tradisional}} \times 100\%$	Laporan Pengembangan Kesenian Tradisional	

			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan kesenian masyarakat lokal yang dilakukan	%	$\frac{\text{Jumlah Pembinaan Kesenian Masyarakat Lokal yang Dilakukan}}{\text{Jumlah Kesenian Masyarakat Lokal}} \times 100\%$	Laporan Pembinaan Kesenian Tradisional	
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
7			Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sejarah yang dilakukan	%	$\frac{\text{Jumlah Pembinaan Sejarah yang Dilakukan}}{\text{Jumlah Sejarah Lokal}} \times 100\%$	Laporan Pembinaan Sejarah	
						$\frac{\text{Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal yang Dilakukan}}{\text{Jumlah Sejarah Lokal}} \times 100\%$	Laporan Pembinaan Sejarah Lokal	
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
8			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola}}{\text{Jumlah Cagar Budaya}} \times 100\%$	Laporan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
						$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan}}{\text{Jumlah Budaya yang Didaftarkan}} \times 100\%$	Laporan Data penetapan Cagar Budaya	
			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	

			Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	%	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar}} \times 100\%$		
			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			Nilai SAKIP	Poin	Hasil Nilai SAKIP Tahun n-1	Inspektorat Kabupaten Pangandaran	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan professional		Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	Poin	Hasil LHE AKIP Tahun n-1	Inspektorat Kabupaten Pangandaran	
9			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana kantor yang dibeli}}{\text{Jumlah sarana prasarana kantor yang diajukan ke RKBU}} \times 100\%$	Dokumen Perencanaan yang tepat waktu	
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	$\frac{\text{Realisasi laporan keuangan - Hasil temuan BPK RI terhadap lap. Keuangan}}{\text{Jumlah total realisasi laporan keuangan}} \times 100\%$	Dokumen Penganggaran Kinerja yang tepat waktu	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur yang mendapatkan undangan pelatihan}} \times 100\%$	Dokumen Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur yang mendapatkan undangan pelatihan}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Keuangan	

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang disusun}} \times 100\%$	Dokumen Perencanaan yang tepat waktu	
				Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang disusun}} \times 100\%$	Dokumen Penganggaran Kinerja yang tepat waktu	
				Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang disusun}} \times 100\%$	Dokumen Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	$\frac{\text{Jumlah laporan kinerja keuangan yang baik}}{\text{Jumlah laporan kinerja keuangan yang disusun}} \times 100\%$		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	

			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis dan Unit/Buah	Jumlah barang dalam kondisi baik sesuai dengan jenis dan unit/buah pada tahun n	Laporan Rekon Aset BMD	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah PAD retribusi tahun n} - \text{Jumlah PAD retribusi tahun (n-1)}}{\text{Jumlah PAD retribusi tahun (n-1)}} \times 100\%$	Laporan PAD Retribusi Tahun n dan Tahun n-1	

			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	$\frac{\text{Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik}}{\text{Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia}} \times 100\%$	Dokumen Administrasi Kepegawaian	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	

			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	$\frac{\text{Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang baik}}{\text{Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia}} \times 100\%$	Dokumen Administrasi Umum	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana kantor yang dibeli}}{\text{Jumlah sarana prasarana kantor yang diajukan ke RKB}} \times 100\%$	Dokumen Perencanaan yang tepat waktu	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan yang Disediakan pada Tahun n Lainnya yang Disediakan	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	$\frac{\text{Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan}}{\text{Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disusun pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang baik dan layak fungsi}}{\text{Jumlah prasarana yang tersedia}} \times 100\%$	Laporan Rekon Aset BMD	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada Tahun n	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 di bawah ini :

Table 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

N o	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Kebudayaan								
1	Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	N/A	15	15	15	15	15	15	15
2	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (%)	N/A	20	30	40	50	60	70	70
3	Jumlah Objek diduga Cagar budaya yang dilestarikan (objek)	N/A	3	3	3	3	3	3	3
	Urusan Pariwisata								
1	Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)	2.930.506	3.000.000	3.108.700	3.295.250	3.558.850	3.914.700	3.993.000	3.993.000
2	Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata (Rp)	13.786.568.250	15.000.000.000	20.000.000.000	23.000.000.000	26.000.000.000	29.000.000.000	32.000.000.000	32.000.000.000
3	Persentase Tingkat hunian Akomodasi (%)	6	6	7	8	9	10	11	11
4	Persentase Usaha Pariwisata Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (%)	N/A	5	10	12	14	16	18	18
5	Pesentase Pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif (%)	N/A	5	15	20	25	30	35	40

Formulasi perhitungan indicator kinerja perangkat daerah yang engacu pada tujuan dan sasaran RPJMD:

Table 7.2
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

N o	Indikator	Formulasi	Keterangan
-1	-2	-3	-4
Urusan Kebudayaan			
1	Penyelenggaraa n Pagelaran Seni dan Budaya	Jumlah pegelaran seni dan budaya yang dilakukan pada tahun n	Jumlah pegelaran seni dan budaya yang dihitung adalah pagelaran yang dilaksanakan atau mendapatkan dukungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandarand
2	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (%)	$\frac{\text{Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan}}{\text{Jumlah objek pemajuan kebudayaan}} \times 100\%$	Jumal objek pemajuan kebudayaan yang dihitung adalah obek pemajuan yang dikembangkan/dilestarikan atau mendapatkan dukungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
3	Jumlah Objek diduga Cagar budaya yang dilestarikan (objek)	$\frac{\text{Jumlah objek diduga cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah objek diduga cagar budaya}} \times 100\%$	Jumal objek diduga cagar budaya yang dihitung adalah obek diduga cagar yang dilestarikan atau mendapatkan dukungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
Urusan Pariwisata			
1	Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)	Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pangandaran pada tahun n	Data jumlah kunjungan wisatawan yang diambil adalah kunjungan wisatawan baik yang dikelola Pemerintah daerah dan diluar Pemerintah Daerah
2	Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata (Rp)	Jumlah PAD Retribusi Pariwisata pada tahun n	Data jumlah PAD retribusi wisata yang diambil adalah retribusi wisata yang dari 5 daya tarik destinasi pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
3	Persentase Tingkat hunian Akomodasi (%)	$\frac{\text{Jumlah kamar terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	Data jumlah kamar terjual diambil dari bagian pendapatan pajak kamar hotel
4	Persentase Usaha Pariwisata Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (%)	$\frac{\text{Jumlah usaha pariwisata yang memiliki TDUP}}{\text{Jumlah usaha pariwisata}} \times 100\%$	Data jumlah usaha yang memiliki TDUP diambil dari OPD yang berwenang mengeluarkan TDUP
5	Pesentase Pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif (%)	$\frac{\text{Jumlah sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing}}{\text{Jumlah sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kretif}} \times 100\%$	Jumlah sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

BAB VIII

PENUTUP



Penutup

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan komitmen dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. RENSTRA sebagai program 5 (lima) tahunan yang dalam implementasinya merupakan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

RENSTRA memuat isu reformasi dan *“Good Governance”* yang mana menjadi bagian penting yang harus disikapi dengan tepat dan cerdas oleh setiap Aparatur Pemerintah. Aparatur yang kompeten, ahli dan mampu di bidangnya serta berwawasan akan mempercepat perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk memenuhi harapan reformasi, instansi pemerintah harus dapat menunjukkan akuntabilitasnya melalui pengukuran pertanggungjawaban keberhasilan capaian tujuan, sasaran dan kebijakan program yang dijalankannya. Dengan selesainya penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 ini, semoga bermanfaat dan berguna sebagaimana mestinya.